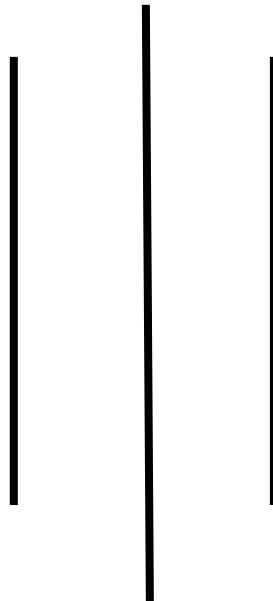




**DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK**



PERATURAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN GRESIK

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN GRESIK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik;

17. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025;
21. Keputusan Bupati Gresik nomor : 050/90 /Hk/437.12/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025;
22. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TW I
TAHUN BERKENAAN

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 2

Uraian Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal : 25 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Gresik,



JOHAR GUNAWAN, S.Pd., S.E, M.M

Pembina (IV / a)

NIP. 19750319 200604 1009

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun 2025, dan menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen perubahan rencana kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, 25 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gresik,



JOHAR GUNAWAN, S.Pd., S.E, M.M

Pembina (IV/a)

NIP. 19750319 200604 1009

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I – PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II – EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TW I TAHUN BERKENAAN	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	69
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	87
 BAB III – TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	95
3.1 Telaahan terhadap Prioritas Nasional	95
3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah	97
3.3 Program dan Kegiatan	99
 BAB IV – PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	111
BAB V – PENUTUP	180

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 juga disusun mengacu pada Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Surat Edaran Bupati Gresik Nomor : 050/494/437.71/2025 tentang Perubahan RKPD dan Renja PD Tahun 2025 serta kebutuhan dana program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan indikator dan target yang merupakan bagian tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dalam urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Perubahan tahun 2025. Mengutamakan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja diawali dengan pengajuan usulan penambahan anggaran sesuai kebutuhan target capaian kinerja pada APBD Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan, perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, melaksanakan Diskusi Fokus antar sub bagian/fungsional yang dilakukan pembahasan secara formal dengan melibatkan seluruh bidang yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik serta penetapan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Gresik untuk dapat dilaksanakan dalam program dan kegiatan tahun 2025.

Dalam proses selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan (2025) dan tahun-tahun sebelumnya (2024). Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Gresik Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik sebagai perwujudan dari undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Gresik Tahun 2021-2026.

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025
21. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2021-2026

22. Peraturan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini adalah sebagai :

1. Acuan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik dalam mengoperasionalkan Perubahan RKPD Kabupaten Gresik tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2025.
3. Mewujudkan kesinambungan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Perubahan RKPD dan RPJMD Kabupaten Gresik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TW I TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Kerja
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra

Untuk mencapai Kinerja Sasaran Strategis dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik ditunjang dengan anggaran Belanja. Pagu APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2025 sebesar **Rp 18.023.591.483,50** (Delapan Belas Milyar Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh sen). Pagu tersebut di atas untuk melaksanakan 3 urusan 5 program, 10 kegiatan dan 33 sub kegiatan.

pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 melalui 5 (lima) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran/utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat **pada tabel** sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ANGGARAN		
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan	1. Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	5,033,140,045.00	691,620,525	13,74
		2. Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan			
		3. Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan			
2	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	1. Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	925,352,081.00	47,437,084.00	5,13
		2. Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah			
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	4,931,123,417.00	426.432.121	8,65
4	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan	Pertumbuhan Analisa Data Sektoral yang Disediakan	106.274.000	106,274,000.00	100%
5	Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	59,114,350.00	960,000.00	1,62

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa analisis kinerja Anggaran disajikan dalam perbandingan antara target alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase capaian realisasi. Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan I pencapaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 5 (lima) sasaran terealisasi sebesar **Rp 2.768.040.519,00** (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah) ekivalen 15,36%.

Sampai Pada akhir tahun anggaran 2025 diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Gresik, pada dasarnya kegiatan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik mendukung pembangunan dan system pemerintahan yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD dalam bidang teknologi informatika terutama dalam pencapaian indeks system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Peranngkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d TW I Tahun 2025

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (kumulatif)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	4	5	6	7		9		14=10+11+12+13		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100	
	Dinas Komunikasi dan Informatika				164.263.013.835		18.023.591.484		2.768.040.519,99	73,81	15,36		69.588.925.178		42,36
	Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika				153.431.274.835		17.896.632.862		2.748.354.520		15,36		67.495.651.888		43,99
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100	54.362.614.835	100	7.007.017.319	100	1.582.864.790	100	22,59	100	26.042.545.624	100,00	47,91

	Kabupaten / Kota														
	Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen/laporan perencanaan dan capaian kinerja SKPD	Persen	100	270.363.370	100	12.246.048	100	5.350.000	100	43,69	200	109.392.175	200,00	40,46
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				185.556.600		6.903.864		4.600.000		66,63		85.315.250		45,98
		Jumlah Peserta Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan	Orang	150	51.492.000	-	-	-	-	-	0	150	56.154.400	100,00	109,05
		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	8	134.064.600	1	6.903.863,92	-	4.600.000	-	66,63	6	29.160.850	75,00	21,75
2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKJiP, LPPD, SAKIP, Laporan Monev Kegiatan)	laporan	72	84.806.770	12	5.342.184,00	5	750.000	42	14,04	53	24.076.925	73,61	28,39

Rata - rata capaian kinerja (%)															100,00	43,69			200,00	40,46
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan gaji dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan SKPD	Persen	100	27.891.844.018	100	5.919.819.019	100	1.362.526.505	100	23,02	100	17.770.497.502	100,00	63,71					
1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN DISKOMINFO	Tahun	2	7.443.498.200	-	-	-	-	0	0	2	7.477.138.397	100,00	100,45					
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	136	20.379.577.534	32	5.917.498.978,58	32	1.362.030.505	100	23,02	132	10.272.303.405	97,06	50,40					
2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD	laporan	2	3.420.000	-	-	-	-	0	0	2	4.366.000	100,00	127,66					

		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	4	26.570.142	1	2.320.040,00	1	496.000	100	21,38	4	2.617.200	100,00	9,85
4	Koordinasi Dan Penyiapan Laporan Keuangan Bulanan / Tribulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran perangkat daerah	laporan	6	8.970.000		- -		-	0	0	6	9.459.000	100,00	105,45
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran perangkat daerah	laporan	4	29.808.142	-	- -		-	0	0	2	4.613.500	50,00	15,48
Rata - rata capaian kinerja (%)										100,00	23,02			100,00	63,71
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah

	Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	persentase fasilitasi ketersediaan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	8.597.000. 000	-	-	-	-	0	0	100	2.298.04 4.550	100, 00	26,7 3
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian kerja lapangan	stel	136	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0,00	0
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	3	230.000.000	-	-	-	-	0	0	0	-	0,00	0,00
5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3	825.000.000	-	-	-	-	0	0	0	-	0,00	0,00
5	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Cukai kepada masyarakat	kali	16	6.000.000.000	-	-	-	-	0	0	8	2.298.044.550	50,00	38,30

		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	300	1.542.000.000	-	-	-	-	0	0	0	-	0,00	0,00
Rata - rata capaian kinerja (%)										0	0			100,00	26,73
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase fasilitas ketersediaan operasional dan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	4.984.159.165	100	217.443.052	100	64.272.400	100	29,56	200	1.699.254.249	200,00	34,09
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				111.552.474		5.717.600		5.690.000		99,52		59.716.590		53,53
	2021-2022 (renstra lama)	Jumlah Bahan Alat Listrik Jumlah Media Converter	Jenis	16	5.509.574	-	-	-	-	0	0	16	26.318.090	100,00	477,68

	2023-2026 (review renstra)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	106.042.9 00	1	5.717.600,0 0	1	5.690.000	100	99,52	4	33.398.5 00	100, 00	31,5 0
8	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkap n kantor				2.385.213. 897		37.471.80 0		37.406.80 0		99,83		716.532. 400		30,0 4
		Jumlah Alat Pendingin Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Bahan Komputer Jumlah Komputer dan Peralatan Komputer	jenis	92	239.942.5 37	-	-	-	-	0	0	92	496.654. 600	100, 00	206, 99
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	24	2.145.271. 360	1	37.471.800, 00	1	37.406.80 0	100	99,83	14	219.877. 800	58,3 3	10,2 5
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				115.284.3 20		4.981.700		4.896.000		98,28	0	53.288.4 00		46,2 2
		Jumlah Bahan Dan Peralatan pembersih	jenis	46	10.941.97 0	-	-	-	-	0	0	46	22.896.0 00	100, 00	209, 25

		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	104.342.350	1	4.981.700,00	-	4.896.000	-	98,28	2	30.392.400	50,00	29,13
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				483.718.078		38.423.700		7.811.100		20,33	0	198.845.600		41,11
		Jumlah Makanan dan Minuman	dos	550	38.463.078	-	-	-	-	0	0	550	84.356.000	100,00	219,32
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	445.255.000	1	38.423.700,00	-	7.811.100	-	20,33	2	114.489.600	50,00	25,71
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan				569.114.355		22.452.232		4.710.000		20,98	0	201.019.766		35,32
		Jumlah Banner Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan Jumlah jasa Publikasi Ucapan	buah (24 banner, 830 amplop, 2020 kertas kop bupati)	2874	33.114.355	-	-	-	-	0	0	2874	111.076.708	100,00	335,43

		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	536.000.000	2	22.452.232,00	-	4.710.000	-	20,98	4	89.943.058	50,00	16,78
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan				64.432.500		718.200		240.000		33,42	0	16.080.000		24,96
		Jumlah Bahan Bacaan	Jenis	8	4.022.500	-	-	-	-	0	0	8	11.980.000	100,00	297,82
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	16	60.410.000	4	718.200,00	-	240.000	-	33,42	8	4.100.000	50,00	6,79
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd				1.254.843.541		107.677.820		3.518.500		3,27	0	453.771.493		36,16
		Jumlah Fasilitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jenis	4	26.000.000	-	-	-	-	0	0	4	178.695.694	100,00	687,29

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	1.228.843.541	2	107.677.820,00	-	3.518.500	-	3,27	4	275.075.799	50,00	22,38
Rata - rata capaian kinerja (%)										100,00	29,56			200,00	34,09
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersediaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	4.218.907.813	100	-	100	-	100	0,00	200	84.725.000	200,00	2,01
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.550.000.000		-		-		0	0	-		0,00
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	8	2.550.000.000	-	-	-	-	0	0	0	-	0,00	
	Pengadaan Mebel				843.907.813		-		-		0	0	84.725.000	0	10,04

		Jumlah Mebel/Kursi	buah	20	6.037.000	-		-	-	0	0	20	70.200.000	100,00	1162,83
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	75	837.870.813	-	-	-	-	0	0	1	14.525.000	1,33	1,73
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				825.000.000		-		-		0	0	-		0,00
		jumlah ruangan kantor yang diberikan sekat antar meja/vertikal blind/kaca film/rak almari	paket	2								2			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	825.000.000	-		-		0		0		0,00	
Rata - rata capaian kinerja (%)										100,00	0,00			200,00	2,01
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase fasilitasi ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	5.451.597. 887	100	763.789.2 00	100	130.298.4 85	100	17,06	200	3.061.08 9.565	200, 00	56,1 5
	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, Listrik				1.650.942. 890		191.301.2 00		32.253.16 5		16,86	0	734.144. 655		44,4 7
		Jumlah Operasional Bulanan	jenis	10	465.684.2 88	-		-	-	0	0	10	378.730. 560	100, 00	81,3 3
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	1.185.258. 602	3	191.301.2 00	3	32.253.16 5	100	16,86	9	355.414. 095	75,0 0	29,9 9
	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkap an Kantor				519.254.9 97		16.810.00 0		5.555.000		33,05	0	202.454. 300		38,9 9
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jenis	6	61.545.94 3	-	-	-	-	0	0	6	118.924. 750	100, 00	193, 23

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	457.709.054	3	16.810.000	-	5.555.000	-	33,05	6	83.529.550	50,00	18,25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.281.400.000		555.678.000		92.490.320		16,64	0	2.124.490.610		64,74
		Jumlah Tenaga Administrasi Non Strata Satu, Jumlah Tenaga Administrasi Strata Satu, Jumlah Tenaga Keamanan, Jumlah Tenaga Kebersihan	orang	36	1.000.200.000	-	-	-	-	0	0	36	980.000.000	100,00	97,98
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	76	2.281.200.000	19	555.678.000	19	92.490.320	100	16,64	57	1.144.490.610	75,00	50,17
Rata - rata capaian kinerja (%)										100,00	17,06			200,00	56,15
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase fasilitas ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	2.948.742.582	100	93.720.000	100	20.417.400	100	21,79	200	1.019.542.583	200,00	34,58
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perijinan Kendaraan Operasional Atau Lapangan				1.164.261.620		93.720.000		20.417.400		21,79	0	616.873.936		52,98
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	kendaraan	12	65.393.620	-	-	-	-	0	0	12	248.225.700	100,00	379,59
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	kendaraan	28	1.098.868.000	7	93.720.000	7	20.417.400	100	21,79	21	368.648.236	75,00	33,55

	Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya				1.784.480.962		-	-		0	0	402.668.647		22,57	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara	paket	1	109.900.000	-	-	-	0	0	1	256.392.325	100,00	233,30	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	4	1.674.580.962	-	-	-	0	0	1	146.276.322	25,00	8,74	
Rata - rata capaian kinerja (%)										100,00	21,79			200,00	34,58
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										100,00	22,59			100,00	47,91
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah

	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1. Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	persen	100	21.907.517.000	100%	5.033.140.045	100%	691.620.525	100	13,74	100%	12.747.642.533	1,00	58,19
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2. Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi	persen	100		100%		100%		100		100%		1,00	
		3. Persentase permintaan data yang difasilitasi PPID	persen	100		100%		100%		100		100%		1,00	
	Pengelolaan informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	-. Jumlah panggilan kedaruratan yg difasilitasi	buah	1.185	21.907.517.000	-	5.033.140.045	-	691.620.525	0	13,74	768	12.747.642.533	64,81	58,19
		-. Jumlah Konten penyelenggaraan pemerintahan yang Di Publikasikan melalui media	buah	5.209		-		-		0		6017		115,51	

		- Jumlah Media yang dimanfaatkan untuk publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan	buah	15		-		-		0		15		100,00	
		- Jumlah Pengaduan yang masuk dan difasilitasi	buah	683		-		-		0		480		70,28	
		- Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	buah	2		-		-		0		7		350,00	
		- persentase Pengaduan yang ditanggapi tepat waktu	Persen	400%		-		-		0		100%		25,00	
		- persentase permohonan informasi publik yang dicukupi	Persen	400%		-		-		0		100%		25,00	
		- Jumlah informasi publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	buah	100		-		-		0		25		25,00	

		- Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan	buah	11.498		-		-		0		2668		23,20	
		- Jumlah lembaga komunikasi publik yang digunakan untuk penyebarluasan edukasi	lembaga	95		-		-		0		23		24,21	
		1. Persentase OPD yang menindaklanjuti pengaduan tepat waktu	Persen	285,21 %		95,6%		95,6 %		100,00		1,956		68,58	
		2. Persentase panggilan kedaruratan yg ditindaklanjuti	Persen	300%		100%		100 %		100,00		2		66,67	
		3. Jumlah OPD yang menyediakan Daftar informasi dan dokumentasi publik	lembaga	27		9		3		33,33		15		55,56	

		4. Jumlah konten informasi pemerintah yang dipublikasikan	buah	6.030		5701		1.413		24,79		3418		56,68	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rapat koordinasi fasilitasi PPID	kali	9	537.014.400	-	-		-		0	9	266.002.185	100,00	49,53
		Jumlah rapat koordinasi fasilitasi pengaduan di aplikasi lapor.go.id	kali	15	178.131.000	-		-	-	0	0	15	209.708.110	100,00	117,73
		jumlah pelatihan penggunaan aplikasi lapor.go.id	kali	3		-		-		0	0	3		100,00	0
		jumlah Sosialisasi terkait informasi publik oleh PPID lingkup OPD	kali	3		-		-		0	0	3		100,00	0
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	2	358.883.400			-	-	0	0	1	56.294.075	50,00	15,69

	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	rekomen dasi	48 (24 rekome ndasi pengad uan dan 24 rekome ndasi call centre)	2.337.433. 000	24 (12 rekome ndasi pengad uan dan 12 rekome ndasi call centre)	580.072.3 50	3	61.900.00 0	0,13	10,67	3	61.900.0 00	0	2,65
	Pengelolaan Konten Dan Perencanaa n Media Komunikasi Publik				1.269.546. 137		-		-		0	0	1.121.21 1.530		88,3 2
		Jumlah pemeilharaan website gresikkab.go.id	paket	2	620.275.4 37			-	-		0		826.883. 909		133, 31
		Jumlah pemeilharaan website SiDesa	paket	1		-		-		0	0	1		100, 00	0
		Jumlah pemeilharaan website siklip	paket	1		-		-		0	0	1		100, 00	0
		Jumlah pemeilharaan website PPID	kali	1		-		-		0	0	1		100, 00	0
		Jumlah lisensi flipping	Dokum en	1		-		-		0	0	1		100, 00	0

		Jumlah rapat koordinasi update data penyelenggaraan pemerintahan dengan OPD	kali	7	-	-	0	0	7		100,00	0			
		jumlah koordinasi kegiatan OPD yang dipublikasikan	kali	51	-	-	0	0	51		100,00	0			
		Jumlah lisensi cpanel tahunan	paket	3	-	-	0	0	3		100,00	0			
		jumlah web hosting OPD yang di kelola	paket	45	-	-	0	0	45		100,00	0			
		Jumlah Pembelian PC untuk desain grafis	paket	2	-	-	0	0	2		100,00	0			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	2	649.270.700	-	0	0	1	294.327.621	50,00	45,33			
	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	1.124	638.000.000	562	24.167.600	100	12.400.000	18	51,31	100	12.400.000	8,90	1,94
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				2.754.273.763		-	48.000.000	0		2.962.670.958			107,57	
		Pembuatan Perda Radio suara Gresik	perda	1	1.352.661.963		-	-	0	0	1	1.702.886.228	100,00	125,89	

		Jumlah Koordinasi dengan Balmon dan pusat terkait perijinan Radio	kali	3		-	-	-	0	0	3	-	100,00	0
		Jumlah luran tahunan frekuensi radio	lisensi	1		-	-	-	0	0	1	-	100,00	0
		Jumlah sewa internet (Mbps)	paket	30		-	-	-	0	0	30	-	100,00	0
		Jumlah Tenaga Penyiar yang di rekrut	orang	15		-	-	-	0	0	15	-	100,00	0
		Jumlah Tenaga teknisi radio	orang	1		-	-	-	0	0	1	-	100,00	0
		Jumlah Tenaga kontent kreatif untuk sosial media	orang	2		-	-	-	0	0	2	-	100,00	0
		Jumlah Tenaga kontent kreatif untuk video	orang	1		-	-	-	0	0	1	-	100,00	0
		jumlah lisensi lagu yang dibeli	buah	950		-	-	-	0	0	950	-	100,00	0
		Jumlah lisensi radiobost	paket	1		-	-	-	0	0	1	-	100,00	0
		Jumlah lisensi Adobe Audition	paket	2		-	-	-	0	0	2	-	100,00	0
		jumlah pemeliharaan pemancar radio FM	paket	2		-	-	-	0	0	2	-	100,00	0

		jumlah Pemeliharaan peralatan streaming	paket	2		-	-	-	0	0	2	-	100,00	0
		jumlah reportase yang dilakukan	kali	372		-	-	-	0	0	372	-	100,00	0
		jumlah domain dan hosting suaragresik.id	paket	2		-	-	-	0	0	2	-	100,00	0
		jumlah penayangan di media televisi	kali	2		-	-	-	0	0	2	-	100,00	0
		Jumlah rapat monitoring dan evaluasi crew radio	kali	92		-	-	-	0	0	92	-	100,00	0
		Jumlah rapat monitoring dan evaluasi media	kali	12		-	-	-	0	0	12	-	100,00	0
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	2	1.401.611.800	1	-	48.000.000	-	0	1	1.259.784.730	50,00	89,88
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	media	32	1.860.000.000	16	820.550.995	16	66.937.000	100	8,16	16	66.937.000	3,60

	Pelayanan Informasi Publik				533.920.000		-	-	-	0	0	0	66.739.179	0	12,50
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	2	533.920.000	1		-	-	-	0	1	66.739.179	50,00	12,50
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	permohonan	2	595.000.000	1	32.630.400	-	10.598.719	-	32,48	0	10.598.719	0,00	1,78
	Layanan Hubungan Media				1.005.256.000		-	-	525.650.000	0	0	0	5.708.818.081	0	567,90
		Jumlah Layanan Hubungan Media	layanan	2	1.005.256.000	1		-	525.650.000	-	0	1	5.708.818.081	50,00	567,90
	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	laporan	2 laporan (notes: jumlah media di pwi+kwg)	1.279.639.000	1	3.532.978.700	1	539.374.806	100	15,27	1	539.374.806	0	42,15
	Manajemen Komunikasi Krisis				5.800.410.400		-		-		0		2.276.824.600		39,25

		Jumlah Tenaga Call Taker dan dispatch yang di rekrut	orang	21	4.322.970.400	-	-	-	0	0	21	1.157.746.600	100,00	26,78
		jumlah tenaga sound dan multi media center	orang	2		-	-	-	0	0	2	-	100,00	0
		Jumlah sewa aplikasi kedaruratan call 112	tahun	2		-	-	-	0	0	2	-	100,00	0
		Jumlah sewa Backup internet (Mbps)	tahun	50		-	-	-	0	0	50	-	100,00	0
		Jumlah Pembangunan media Centre	unit	1			-	-	0	0	0	-	0,00	0
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	dokumen	2	1.477.440.000		-	-	0	0	1	1.119.078.000	50,00	75,74
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				440.514.100	-	-	-	0	0	0	63.360.500	0	14,38
		Jumlah Jatim Kominfo Festival (JKF) yang di ikuti oleh KIM	kali	1	31.719.000	-	-	-	0	0	1	54.360.500	100,00	171,38

		Jumlah pelatihan untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	kali	4	-	-	-	0	0	5	-	125,00	0
		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	260	408.795.100	-	-	0	0	130	9.000.000	50,00	2,20
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	260	555.000.000	-	-	0	0	0	-	0,00	0,00
	penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				596.603.200	-	-	0	0	0	54.973.000	0	9,21
		Jumlah rekomendasi Branding Kabupaten Gresik	laporan	5	266.603.200	-	-	0	-		-	0,00	
		Jumlah Kebijakan Branding Kabupaten Gresik	laporan	2		-	-	0	-	0	-	0,00	

		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	2	330.000.000	1		-	-	-	-	0	-	0,00	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		Komunitas	4	540.000.000	2	42.740.000	2	410.000	100	0,96	2	410.000	50,00	0,08
	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				1.164.907.000		-	-	-	0	0	0	109.071.975	0	9,36
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	unit	12	1.164.907.000			-	-	0	0	3	109.071.975	25,00	9,36

Rata - rata capaian kinerja (%)										64,53	13,74			64,53	58,19
Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										100,00	13,74			1,00	58,19
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah
	Program Aplikasi Informatika	1. Presentase OPD yang Memanfaatkan Ruang Server	Persen	150%	77.161.143.000	100%	5.856.475.498	100%	473.869.205	100	8,09	2,56	28.705.463.731	170,67	37,20
	Program Pengelolaa n Aplikasi Informatika	2. Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Aset TIK	Persen	252%		75%		2%		3		1,11		44,05	
		3. Persentase OPD yang Menggunakan Sistem Penghubung Layanan	Persen	252%		75%		26,08%		34,77		1,29		51,25	
		4. Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Data	Persen	252%		50%		50%		100		1,28		50,83	

		1. Prosentase Dokumen Kebijakan yang dievaluasi	Persen	600%		100%		100%		100		4,00		66,67	
		2. Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi	Persen	600%		100%		100%		100		4,00		66,67	
		3. Persentase OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	Persen	525%		100%		100%		100		3,64		69,33	
		4. Persentase aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi	Persen	272%		73% (11/15)		53%		73		0,53		19,49	
		5. Persentase OPD yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE	Persen	210%		100%		50%		50		1,95		92,86	
	Pengelolaan Nama Domain Yng Telah Di Tetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub	-. Kapasitas Bandwith Internet untuk perkantoran pemerintahan	Gb	9,60	23.230.911.740	-	-	-	-	0	-	2,10	20.389.575.758	21,88	87,77

	Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /kota														
		- Jumlah kelurahan, kecamatan dan OPD yang terlayani jaringan intranet	OPD	176		-		-		0		176 ,00		100, 00	
		- jumlah pemeliharaan jaringan intra	paket	2		-		-		0		2,0 0		100, 00	
		- jumlah pemeliharaan jaringan Fiber Optik	paket	2		-		-		0		2,0 0		100, 00	
		- jumlah pemeliharaan jalur CCTV	paket	2		-		-		0		2,0 0		100, 00	
		2. Jumlah OPD yang dibina untuk menerapkan manajemen Aset TIK	OPD	50		15		5,00		33,3 3		20, 00		40,0 0	

		1. Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah	persen	276% (2417/35040 jam)		8.052 jam (92% dari 8.760 jam)	0,33			0,33		1,23		0,45	
	Penyelenggaran Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				23.230.911.740		-		-		0	0	20.389.575.758		87,77
		Kapasitas Bandwith Internet untuk perkantoran pemerintahan	GBps	1,50	8.813.204.511	-	-		-	0	0	1,50	8.188.320.773	100,00	92,91
		Jumlah Kelurahan, Kecamatan Dan OPD Yang Terlayani Jaringan Intranet	lembaga	176		-	-		-	0	0	176	-	100,00	0
		Jumlah metro untuk mendukung jaringan intra pemerintah	unit	88		-	-		-	0	0	52	-	59,09	0
		Jumlah tenaga ahli jaringan yang di rekrut	orang	2		-	-		-	0	0	2	-	100,00	0
		jumlah server clustering yang diadakan	unit	4		-	-		-	0	0	4	-	100,00	0

		Jumlah iuran As number (tahunan)	tahun	2		-		-	-	0	0	2	-	100,00	0
		jumlah pemeliharaan jaringan intra	paket	2		-		-	-	0	0	2	-	100,00	0
		jumlah pemeliharaan jaringan Fiber Optik	paket	2		-		-	-	0	0	2	-	100,00	0
		jumlah pemeliharaan jalur CCTV	paket	2		-		-	-	0	0	2	-	100,00	0
		rapat koordinasi terkait penggunaan jaringan intra	kali	5		-		-	-	0	0	5	-	100,00	0
		jumlah perjalanan dinas pengecekan troubleshooting jaringan	kali	36		-		-	-	0	0	36	-	100,00	0
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	2	14.417.707.229		1	-	0	0	0	2	12.201.254.985	100,00	84,63
Rata - rata capaian kinerja (%)										16,83	0,00			66,05	87,77
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Tinggi
	Pengelolaan E-Government Di Lingkungan Pemerintah	- . Jumlah server backup yang di adakan	unit	3	53.930.231.260	-	5.856.475.498	-	473.869.205	0	8,09	1	8.315.887.973	33,33	15,42

	Daerah Kabupaten / Kota														
		- Jumlah UPS yang diadakan	unit	2		-		-		0		1		50,0 0	
		- Jumlah tenaga ahli programmer yang di rekrut	orang	2		-		-		0		2		100, 00	
		- Kapasitas server clustering	GB	1.220		-		-		0		986		80,8 5	
		- Kapasitas server backup data	Tb	24		-		-		0		44		183, 33	
		- Kapasitas Backup Listrik (UPS)	kVa	12		-		-		0		15		125, 00	
		- Manajemen Data Warehouse/Big Data	paket	1		-		-		0		0		0,00	
		- Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	tingkat	13		-		-		0		4		30,7 7	

		- Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	tingkat	15		-		-		0		3		20,00	
		- Jumlah OPD yang mengakses data dari Sistem Penghubung Layanan	lembaga	26		-		-		0		5		19,23	
		- Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	tingkat	15		-		-		0		5		33,33	
		- Jumlah Kebijakan SPBE yang dievaluasi	pedoman	4				-		0		4		100,00	
		- Jumlah Indikator SPBE yang dievaluasi	indikator	94		-		-		0		94		100,00	
		- Jumlah OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	lembaga	60		-		-		0		56		93,33	

		-. jumlah aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi	aplikasi	2		-		-		0		2		100,00	
		-. Jumlah Opd yang menerapkan manajemen Layanan SPBE	lembaga	6		-		-		0		6		100,00	
		1. Jumlah VPS yang dikelola	buah	585		212		40,00		18,87		220		37,61	
		2. Jumlah API yang dikelola	buah	66		36		10,00		27,78		28		42,42	
		1. Jumlah pedoman pelaksanaan SPBE yang disusun dan dievaluasi	pedoman	8		4		-		-		4		50,00	
		2. Jumlah Dokumen Perencanaan SPBE yang dievaluasi	dokumen	8		2		-		-		4		50,00	

		3. Jumlah aplikasi yang difasilitasi pengembangannya menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle)	aplikasi	39		11		11		100,00		24		61,54	
		4. Jumlah Indikator Evaluasi SPBE yang dipenuhi Data Dukung dan Narasinya	indikator	188		47		47,00		100,00		94		50,00	
		-. Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	tingkat	18		-		-		0		3		16,67	
		-. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	tingkat	14		-		-		0		2		14,29	
		5. Jumlah layanan yang dikelola melalui service desk5.	Layanan	99		31		-		-		0		0,00	

	Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota				954.525.000		-	-	-		0	0	591.172.653		61,93
		1. Jumlah Kebijakan SPBE yang dievaluasi	pedoman	3	359.525.000	-		-	-	0	0	3	348.343.588	100,00	96,89
		2. Jumlah Kebijakan SPBE yang disusun	pedoman	1		-		-	-	0	0	1	-	100,00	0
		3. Jumlah SOP SPBE yang disusun	pedoman	4		-		-	-	0	0	4	-	100,00	0
		4. Jumlah Rapat Koordinasi SPBE	kali	2		-		-	-	0	0	2	-	100,00	0
		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	595.000.000			-	-	0	0	4	242.829.065	100,00	40,81

	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	8	1.500.000.000	4	35.193.450	-	5.440.000	-	15,46	0	5.440.000	0,00	0,36
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				527.734.000		-		-		0	0	205.580.777		38,96
		1. Jumlah FGD Penerapan Peta Rencana SPBE	kali	12	329.404.000	-	-	-	-	0	0	12	164.817.750	100,00	50,04
		2. Jumlah OPD yang difasilitasi dalam Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE	opd	36		-	-	-	-	0	0	76	-	211,11	0
		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	dokumen	8	198.330.000		-	-	-	0	0	4	40.763.027	50,00	20,55

	Koordinasi penyusunan dan/atau review arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Dokumen	2	350.000.000	1	188.410.000	-		-	0,00	0		0,00	0,00
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah				9.280.068.241		-		-		0	0	753.929.325		8,12
		Jumlah perencanaan Pembangunan media centre	paket	1	3.614.204.447		-	-	-	0	0	1	545.784.825	100,00	15,10
		Jumlah Pembangunan Ruang Server Baru	paket	1		-		-	-	0	0	0	-	0,00	0
		Jumlah Pendeteksi suhu ruangan	unit	1		-		-	-	0	0	1	-	100,00	0
		Jumlah AC central	unit	1		-		-	-	0	0	1	-	100,00	0
		Jumlah server clustring yang di adakan	unit	2		-		-	-	0	0	2	-	100,00	0
		Jumlah server backup yang di adakan	unit	1		-		-	-	0	0	1	-	100,00	0
		Jumlah UPS yang diadakan	unit	1		-		-	-	0	0	1	-	100,00	0

		Jumlah listrik premium yang diadakan	unit	1		-		-	-	0	0	1	-	100,00	0
		Jumlah rapat koordinasi terkait pemanfaatan ruang server oleh OPO	kali	10				-	-	0	0	10	-	100,00	0
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	unit	2	5.665.863.794			-	-	0	0	2	208.144.500	100,00	3,67
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	200	13.277.651.788	100	55.300.282	100	-	100	0,00	100	-	50,00	0,00
	Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik				1.509.093.380		-		-		0	0	4.744.170.779		314,37
		Jumlah Lisensi Office 365 yang disewa;	lisensi	3	774.703.380	-	-	-	-	0	0	1	999.572.244	33,33	129,03
		Jumlah Lisensi Zoom yang disewa;	lisensi	10		-		-	-	0	0	9	-	90,00	0

		Jumlah Aplikasi Gresikpedia yang disewa;	bulan	23		-		-	-	0	0	23	-	100,00	0
		Jumlah Tenaga Ahli Programmer yang direkrut;	orang	2		-		-	-	0	0	2	-	100,00	0
		Jumlah Portal Layanan Administrasi Pemerintahan yang dibangun/Sewa Aplikasi One Handling System	paket	1		-		-	-	0	0	1	-	100,00	0
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	aplikasi	19	734.390.000			7	-	0	0	18	3.744.598.535	94,74	509,89
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	22	813.922.000	11	572.175.900	11	27.463.144	100	4,80	11	27.463.144	50,00	3,37

	Penyeleng araan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah				567.167.1 39		-		-		0	0	406.000. 633		71,5 8
		Jumlah tenaga ahli programer yang di rekrut	orang	2	160.535.1 62	-	-	-	-	0	0	2	160.705. 500	100, 00	100, 11
		Jumlah rapat koordinasi tentang layanan penghubung	kali	4		-	-	-	-	0	0	4	-	100, 00	0
		Jumlah rapat monitoring database OPD	kali	3		-	-	-	-	0	0	3	-	100, 00	0
		Jumlah sosialisasi arsitektur data dan informasi	kali	2		-	-	-	-	0	0	2	-	100, 00	0

		Jumlah perjalanan dinas terkait layanan penghubung di OPD	kali	20		-		-	-	0	0	20	-	100,00	0
		Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	24	406.631.977	10		-	-	-	0	14	245.295.133	58,33	60,32
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	60	691.931.864	30	49.370.300	30	-	100	0,00	30	-	50,00	0,00
	Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas Dan Kota Cerdas				1.215.750.000		-		-		0		773.304.144		63,61

		1. FGD Penerapan Smart City	kali	14	398.250.000	-	-	-	-	0	0	14	384.270.151	100,00	96,49
		2. Jumlah Rapat Evaluasi Smart City	kali	5		-	-	-	-	0	0	5	-	100,00	0
		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	dokumen	24	817.500.000	6	6	-	100	0	12	389.033.993	50,00	47,59	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Perangkat daerah	56	1.042.301.000	28	58.234.781	28	9.761.790	100	16,76	28	9.761.790	50,00	0,94

	Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah				775.200.500	-	-	0	0	318.990.457	0	41,15		
		Rapat OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE (4 x 48 OPD)	kali	48	375.200.500	-	-	-	0	217.562.225		57,99		
		Jasa konsultasi Pengelolaan Layanan SPBE	paket	1		-	-	-	0	0	1	-	100,00	0
		Pembangunan Single sign on	paket	1		-	-	-	0	0	1	-	100,00	0

		Jumlah Pelatihan Manajemen jaringan OPD	kali	2		-		-	-	0	0	2	-	100,00	0
		Jumlah Pelatihan Manajemen data	kali	2		-		-	-	0	0	2	-	100,00	0
		Jumlah Pelatihan Sistem Penghubung layanan	kali	2		-		-	-	0	0	2	-	100,00	0
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	2	400.000.000			-	-	0	0	1	101.428.232	50,00	25,36
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	6	750.000.000	3	71.337.950	1	4.772.150	33	6,69	1	4.772.150	16,67	0,64

	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE				208.032.000		-		-		0	0	48.870.000		23,49
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	8	208.032.000			1	-	0	0	5	48.870.000	62,50	23,49
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	perangkat daerah	92	20.466.854.348	46	4.826.452.835	46	426.432.121	100	8,84	46	426.432.121	50,00	2,08
Rata - rata capaian kinerja (%)										35,24	8,09			59,67	15,42
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PROGRAM APILKASI INFORMATIKA										73,38	8,09			70,20	37,20
Predikat Kinerja										Sedang	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah

											ah				dah	
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Komunikasi dan Informatika					153.431.274.835		17.896.632.862		2.748.354.520				67.495.651.888			
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											91,13	14,81			57,07	47,77
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah
	Urusan Pemerintah Bidang Statistik				4.015.829.000		67.844.272		18.726.000		27,60		1.173.233.525		29,22	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun	persen	133%	4.015.829.000	33%	67.844.272	0,10	18.726.000	30,30	27,60	90%	1.173.233.525	67,67	29,22	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	- Jumlah Data Sektoral lingkup OPD yang disusun	data	6	4.015.829.000		67.844.272	-	18.726.000	0	27,60	3,00	1.173.233.525	50,00	29,22	

		- Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Satu Data	kali	12		-		-		0		3,00		25,00	
		1. Jumlah OPD yang menyusun atau mengolah data secara terpilah gender	OPD	18		5		5,00		100		17,00		94,44	
		- Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	tingkat	18		-		-		0		3,00		16,67	
		2. Jumlah OPD yang mengumpulkan data statistik sektoral	buah	135		45		45,00		100		80,00		59,26	
		3. Jumlah Data Induk yang dikelola	buah	12		4		2,00		50		4,00		33,33	
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Di Seminarsi				1.451.680.000		-	-	-	0	0	0,00	365.495.525	0	25,18

	Data Statistik Sektoral														
		Jumlah Cetakan ke dua Buku DDA / KDA yang diterbitkan BPS Kabupaten Gresik	buah	100	807.853.000	-	-	-	0	131.908.772	16,33				
		Jumlah rapat pembuatan Kebijakan satu data	kali	6	-	-	-	0	0	0,00	-	0,00	0		
		Jumlah Sosialisasi tentang data sektoral OPD	kali	1	-	-	-	0	0	1	-	100,00	0		
		Jumlah Sosialisasi tentang Wali data	kali	2	-	-	-	0	0	2	-	100,00	0		

		Jumlah rapat koordinasi data statistik sektoral	kali	4		-		-	-	0	0	4	-	100,00	0
		Jumlah penyusunan data inflasi Kabupaten Gresik	data	1		-		-	-	0	0	1	-	100,00	0
		Jumlah penyusunan data analisa bencana Balongpanggang Benjeng Cerme	data	1		-		-	-	0	0	1	-	100,00	0
		Jumlah penyusunan data NTN dan NTP	data	1		-		-	-	0	0	1	-	100,00	0
		Jumlah tenaga ahli analis statistik yang di rekrut	orang	1		-		-	-	0	0	1	-	100,00	0

		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen	2	643.827.000			-	-	0	0	2	233.586.753	100,00	36,28
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	2	815.000.000	1	44.143.472	-	15.726.000	-	35,62	0	15.726.000	0,00	1,93
	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				325.000.000		-	-	-	0		0		0	0,00

		jumlah OPD yang di beri pelatihan tentang data statistik sektoral	lembaga	48			-	-		0		0		0,00	
		Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	orang	74	325.000.000			-		0		0		0,00	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	45	485.000.000	45	23.700.800	-	3.000.000	-	12,66	0	3.000.000	0,00	0,62
	Pengembangan Infrastruktur				379.500.000		-	-	-	0	0	0	763.420.500	0	201,16

		Jumlah Infrastruktur Statistik	unit	4	379.500.000			-	-	0	0	2	763.420.500	50,00	
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	persen	,	559.649.000		-	-	-	0	0	0	-	0	0,00
Rata - rata capaian kinerja (%)										83,33	27,60			46,45	29,22
Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL										30,30	27,60			67,67	29,22
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Statistik					4.015.829.000		67.844.272		18.726.000				1.173.233.525		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN STATISTIK										30,30	27,60			67,67	29,22
Predikat Kinerja										Sangat	Sangat			Sedang	Sangat

										Ren dah	Rend ah				Ren dah
	Urusan Pemerintah an Bidang Persandian			600%	6.815.910. 000	100%	59.114.35 0	0	960.000	100	1,62	3	920.039. 765		13,5 0
	Program Penyelengg araan Persandian Untuk Pengamana n Informasi	Penanganan Serangan Cyber	persen	600%	6.815.910. 000	100%	59.114.35 0	100 %	960.000	100, 00	1,62	4,0 0	920.039. 765	66,6 7	13,5 0
	Penyelengg araan Persandian untuk Pengamana n Infomasi Pemeintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Keamanan Informasi	persen	502%	6.815.910. 000	-	59.114.35 0	-	960.000	0	1,62	2,0 2	920.039. 765	40,2 4	13,5 0
	Penyelengg araan Persandian untuk Pengamana n Infomasi	1. Jumlah OPD yang menerapkan management keamanan informasi	lemba ga	27		9		3,00	-	33,3 3	0	9,0 0	-	33,3 3	0

	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				1.175.391.894		6.616.400		960.000,00		14,51	0	156.948.282		13,35
		jumlah OPD yang diberikan pelatihan tentang keamanan informasi	lembaga	58	103.326.000			-	-	0	0	58	137.943.000	100,00	133,50
		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	laporan	4	1.072.065.894	1	6.616.400	-	960.000,00	-	14,51	2	19.005.282	50,00	1,77

	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik				5.640.518.106		52.497.950	-	-	0	0,00	0	763.091.483	0	13,53
		Jumlah Firewall yang digunakan untuk keamanan jaringan	Unit	1	286.477.000	0	-	-	-	0	0	1	446.281.753	100,00	155,78
		Jumlah Pengamanan yang digunakan untuk mengamankan transmisi data antar dua sistem yang berbeda	paket	2		0	-	-	-	0	0	2	-	100,00	0
		Jumlah user Antivirus	user	75		0	-	-	-	0	0	75	-	100,00	0
		Jumlah tenaga ahli untuk penanganan insiden keamanan yang di rekrut	orang	3		0	-	-	-	0	0	3	-	100,00	0

		Jumlah maintainance email gresikkab.go.id	paket	1		0		-	-	0	0	1	-	100,00	0
		Jumlah Sosialisasi arsitektur keamanan informasi	kali	2		0		-	-	0	0	2	-	100,00	0
		Jumlah Sosialisasi Digital Signature	kali	2		0		-	-	0	0	2	-	100,00	0
		Jumlah pelatihan penggunaan Digital Signature	kali	5		0		-	-	0	0	5	-	100,00	0
		Jumlah evaluasi penggunaan Digital Signature	kali	2		0		-	-	0	0	2	-	100,00	0
		Jumlah Perjalana Dinas terkait penanganan keamanan infomasi	kali	37		0		-	-	0	0	37	-	100,00	0
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	4	5.354.041.106	1	52.497.950	-	-	-	0,00	2	316.809.730	50,00	5,92

Rata - rata capaian kinerja (%)						33,3 3	1,62			36,7 9	13,5 0
Predikat Kinerja						Sang gat Ren dah	Sang at Rend ah			Sang gat Ren dah	Sang gat Ren dah
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						100, 00	1,62			66,6 7	13,5 0
Predikat Kinerja						Sang gat Ting gi	Sang at Rend ah			Sed ang	Sang gat Ren dah
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urus Persandian	6.815.910. 000		59.114.35 0	-	960.000	100	1,62	0	920.039. 765		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN PERSANDIAN						100, 00	1,62			66,6 7	13,5 0
Predikat Kinerja						Sang gat Ting gi	Sang at Rend ah			Sed ang	Sang gat Ren dah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kelembagaan dan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik.

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi dan informasi.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat guna terbentuknya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.
3. Menyediakan layanan administrasi perkantoran berbasis elektronik yang tertata dan handal serta meningkatkan mutu layanan publik dan layanan pemerintahan.
4. Mengintegrasikan aplikasi sistem informasi dan basis data yang terkoneksi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan portal layanan masyarakat mudah diakses.

Dalam rangka mengoptimalkan dan memaksimalkan tugas dan fungsi kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika maka dilakukan perubahan indikator sasaran dengan melakukan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2021-2026, alasan dilakukan perubahan indikator adalah sebagai berikut :

- sesuai Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, dimana dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026, nilai indeks SPBE menjadi salah satu indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Gresik;

- Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan cascading dengan cara mengambil tingkat kematangan indikator SPBE sebagai indikator kinerja utama. Hal ini menyulitkan dalam melakukan pengukuran berkala (bulanan atau triwulanan) karena tingkat kematangan hanya bisa diukur oleh kementerian PANRB yang hasilnya keluar pada awal tahun berikutnya;
- Indikator kinerja perangkat daerah seharusnya dinilai oleh Kepala Daerah, bukan Kementerian;
- sesuai Permen PANRB No. 89 Tahun 2021 dijelaskan bahwa indikator harus memenuhi kriteria SMART, bersifat Spesifik (tidak bias) dan Measurable (memiliki ukuran kuantitatif) sedangkan tingkat kematangan merupakan ukuran kualitatif berikut disampaikan pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 dan Tahun 2024 (realisasi s.d TW II) serta proyeksi realisasi pada tahun 2025-2026.

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gresik

Indikator	Bidang penanggung jawab	Baseline	Target Renstra (perubahan) --- Kemendagri 050				Realisasi		Proyeksi Realisasi		Catatan Penting
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
INDIKATOR KINERJA TUJUAN RENSTRA/SASARAN RPJMD											
Indeks SPBE	Diskominfo	2,55	3,65	3,86	4,03	4,13	4,28	4,28	4,03	4,13	4,13
IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)											
1. Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan	Bidang Statistik dan Informasi Publik										Tahun 2024 terdapat perubahan indikator sasaran renstra
1. Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik		3	4				5				
2. Pertumbuhan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang disediakan		50 informasi	10% ~ 55 dari 50 informasi				46%~ 73 dari 50 informasi				
3. Pertumbuhan konten edukasi yang dipublikasikan		1056 konten edukasi	2% ~ 1077 dari 1056 konten edukasi				9%~ 1150 dari 1056 konten edukasi				

2. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Bidang Teknologi Informatika										Tahun 2024 terdapat perubahan indikator sasaran renstra
1. Persentase perangkat daerah yang terlayani infrastruktur TI		0%	25%				97.22% (70 OPD / 72 OPD)				
3. Meningkatnya Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE	Bidang SPBE										Tahun 2024 terdapat perubahan indikator sasaran renstra
1. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE		4	5				4				
2. Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE		3	3				3				
4. Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang yang disediakan	Bidang SPBE										Tahun 2024 terdapat perubahan indikator sasaran renstra
1. Pertumbuhan Analisa Data Sektoral yang disediakan		4 (tahun 2022)	2 analisa (50%) ~ 6 dari 4 analisa data sektoral				4 analisa (100%) ~ 8 dari 4 analisa data sektoral				
5. Meningkatnya keamanan sistem elektronik	Bidang SPBE										Tahun 2024 terdapat perubahan indikator sasaran renstra
1. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi		1	3				3				

Indikator	Bidang penanggung jawab	Baseline	Target Renstra (perubahan) --- Kemendagri 900.1				Realisasi		Realisasi s/d TW I	Proyeksi Realisasi	Catatan Penting
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)											
1. Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan	Bidang Statistik dan Informasi Publik										Indikator baru pada sasaran renstra
1. Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan		92,1%		92,2%	92,3%	92,4%		97,1%	100%	92,4%	
2. Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan		121		131	141	151		213	31	151	
3. Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan		1800		1810	1820	1830		3362	959	1830	
2. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Bidang Teknologi Informatika										Indikator baru pada sasaran renstra
Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data		75% (6.570 jam dari 8.760 jam)		80% (7.008 jam dari 8.760 jam)	85% (7.446 jam dari 8.760 jam)	90% (7.884 jam dari 8.760 jam)		90.25% (7906 jam dari 8760 jam dengan rumus perhitungan : ((8760-564.1)*100)/8760)	99,89% (8750 jam dari 8760 jam)	90% (7.884 jam dari 8.760 jam)	

3. Meningkatnya Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE	Bidang SPBE										Indikator baru pada sasaran renstra
1. Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi		100%		100%	100%	100%		100%	25%	100%	
2. Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah		75%		75%	75%	75%		75%	0%	75%	
4. Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang yang disediakan	Bidang SPBE										Indikator baru pada sasaran renstra
Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan		0		4 rekom	4 rekom	4 rekom		4 rekom	1 rekom	4 rekom	
5. Meningkatnya keamanan sistem elektronik	Bidang SPBE										Indikator baru pada sasaran renstra
Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi		18		30	40	58		30	11	58	

Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi”.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 5 (lima) sasaran strategis Dinas Komunikasi Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan

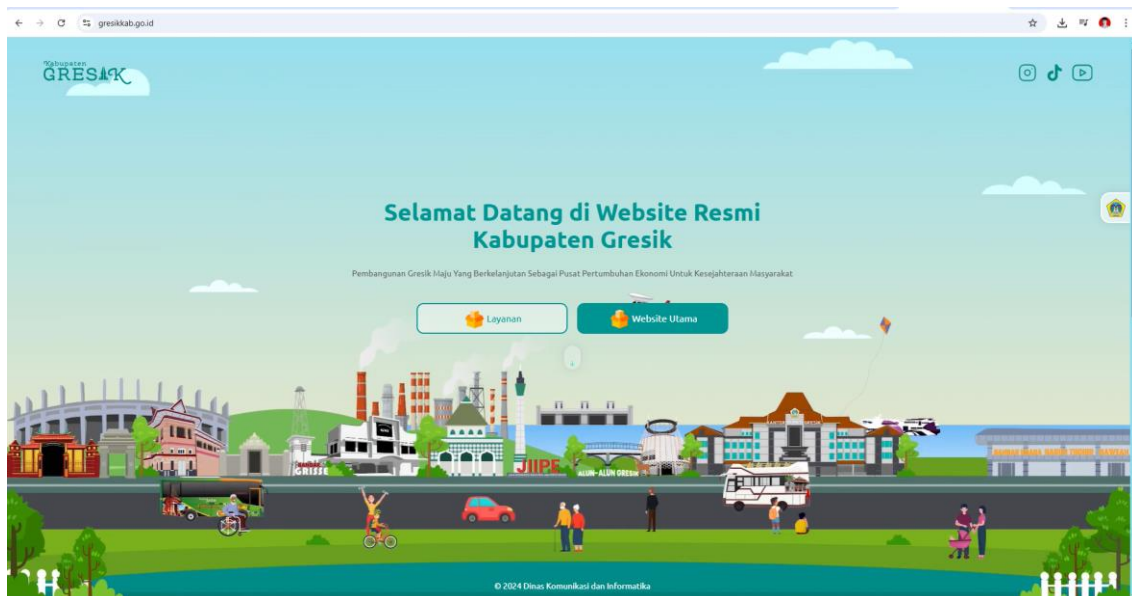
Pada sasaran strategis 1, “Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan” memiliki 3 indikator kinerja, dengan semua indikator tercapai.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI s/d TW I	CAPAI AN
Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektor yang Dipublikasikan	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	92,3%	100%	108%
	Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	141	31	22%
	Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	1820	959	53%

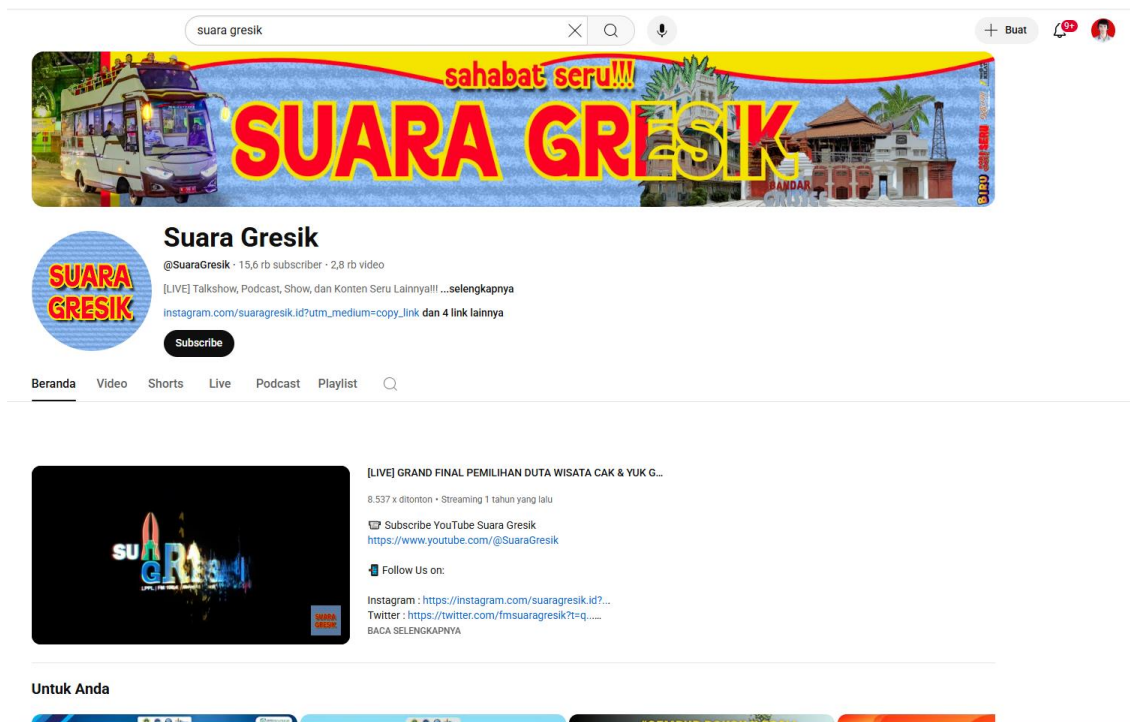
Saat ini, keterbukaan informasi memberikan dampak besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gresik, sehingga penyebarluasan informasi harus lebih dioptimalkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

membentuk satu wadah internal yang diberi nama Gresik News Room, yang bertujuan untuk menjaring informasi terupdate, serta menyaring berita hoax terkait kegiatan pemerintahan. Saat ini masyarakat, terutama kaum milenial memiliki berbagai pilihan untuk mengakses layanan informasi yang disediakan oleh pemerintah seperti website Kabupaten Gresik (gresikkab.go.id), akun IG @pembkabgresik, youtube suaragresik, akun FB Pemerintah Kabupaten Gresik, Tiktok @pembkabgresik.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2025 guna mencapai sasaran strategis ke-1 adalah sebagai berikut :



Website gresikkab.go.id



Youtube Suara Gresik



Facebook Pemerintah Kabupaten Gresik



pemkabgresik

Follow

Message

3,756 posts

31.9K followers

235 following

Pemerintah Kabupaten Gresik

pemkabgresik

Digital creator

Instagram Resmi Pemerintah Kabupaten Gresik

Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika @kominfogresik

Website Resmi Pemkab Gresik

gresikkab.go.id/home + 1

POSTS

REELS

TAGGED



Instagram @pemkabgresik

pemkabgresik

Follow

Message

...



5,702 posts

41.6K followers

239 following

Pemerintah Kabupaten Gresik

pemkabgresik

Government Official

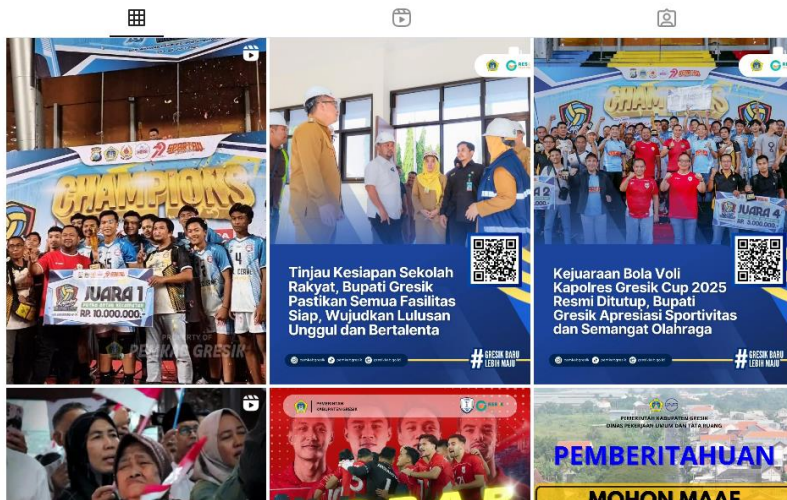
Instagram Resmi Pemerintah Kabupaten Gresik

Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika @kominfogresik

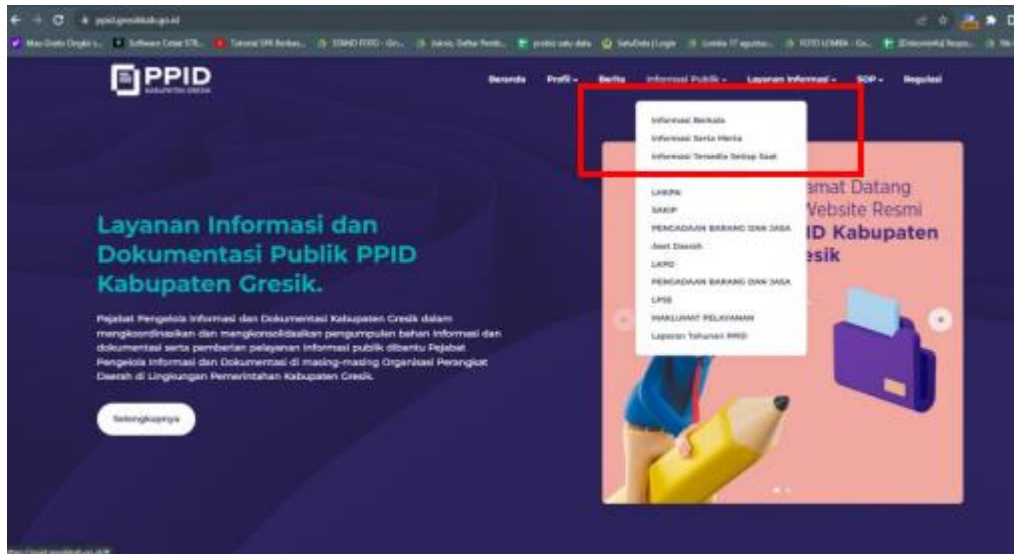
Website... more

gresikkab.go.id/home

Followed by hestyhapsari, nopsaka + 34 more



Tiktok @pemkabgresik



Website ppid.gresikkab.go.id

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)

Pada sasaran strategis 2, “Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data, dan tercapai dengan realisasi 99.55% (2160 jam dari 2160 jam)

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2025 guna mencapai sasaran strategis ke-2 adalah sebagai berikut :



Pengecekan jaringan intra di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Gresik

**SASARAN
STRATEGIS 3**

Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE

Pada sasaran strategis 3, memiliki 2 indikator kinerja. Tingkat kinerja pada Sasaran Strategis 3 dapat dilihat pada **Tabel 3.3** berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI s/d TW I	CAPAIAN 2025
Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	100%	25%	25%
	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	75%	0%	0%

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2025 guna mencapai sasaran strategis ke-1 “Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE” adalah sebagai berikut :



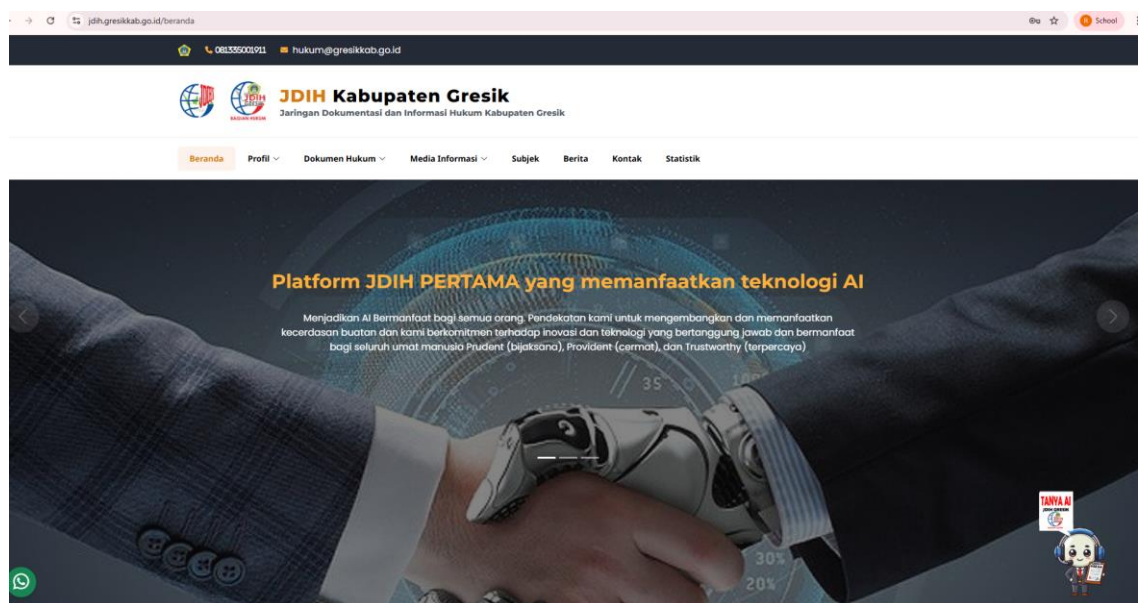
Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Service Desk



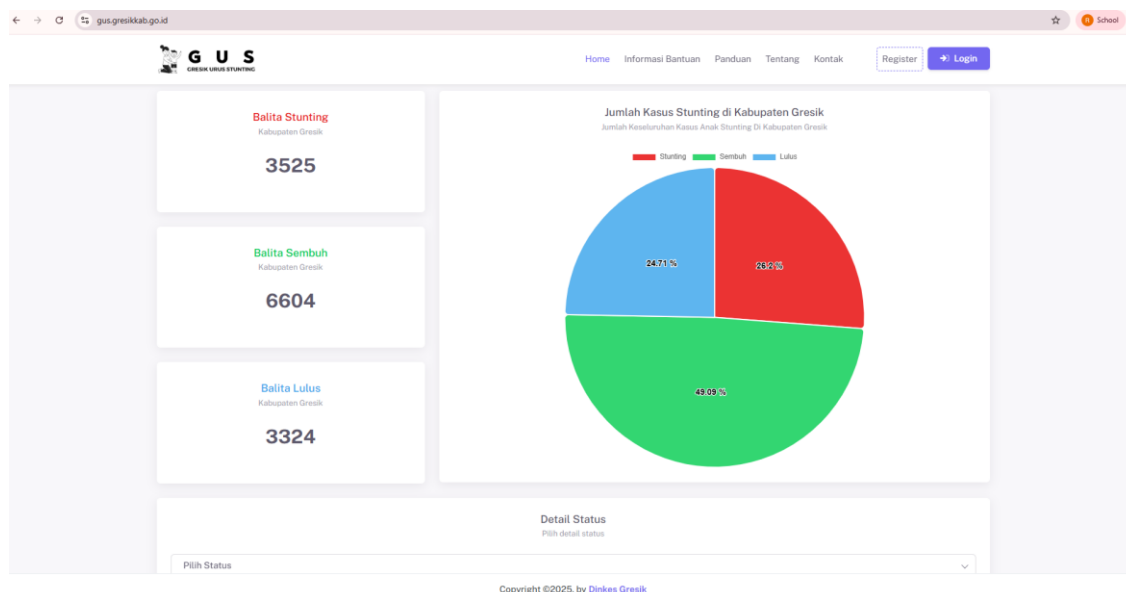
Dokumentasi Rapat Sosialisasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kab. Gresik Tahun 2023-2026



Dokumentasi Rapat Monev Kinerja Tim Koordinas SPBE



Tampilan menu website <https://jdiH.gresikkab.go.id/>



Tampilan Aplikasi GUS

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan

Pada sasaran strategis 4, memiliki 1 indikator kinerja, dengan tingkat capaian 25%.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI s/d TW I	CAPAIAN 2025
Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang yang disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	4 rekomendasi	1 rekomendasi	25%

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2025 guna mencapai sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :



Kegiatan Pendampingan Pengisian dan Verifikasi Data pada Aplikasi SIPD E-Walidata



Desk Romantik dan Penyusunan Metada Statistik

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik

Pada sasaran strategis 5, “Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik” memiliki 1 indikator kinerja dengan tingkat capaian 100%.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI s/d TW I	CAPAIAN 2025
Meningkatnya keamanan sistem elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	40	11	28%

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik mendukung fasilitas antara lain :

- Penyediaan, Pengelolaan Sistem Informasi melalui media elektronik dalam bentuk Domain Situs Web Pemerintah Kabupaten Gresik maupun Sub Domain yang dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah hingga Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini merupakan salah satu program dalam melaksanakan pengembangan *e-Government* dengan sasaran agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses informasi dan layanan pemerintahan, serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan dengan menggunakan media internet.
- Layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara pelayanan publik yang dibentuk untuk mendorong “*no wrong door policy*” untuk menjamin hak

masyarakat agar pengaduan dari manapun & jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang. Dinas Komunikasi dan Informatika atas nama Pemerintah daerah Kabupaten Gresik berperan melakukan monev pengelolaan pengaduan kepada seluruh Unit Kerja dengan dapat melibatkan APIP sebagai pengawas internal.

- c. Fasilitasi Pengintegrasian Aplikasi pendukung kinerja atau Sistem Informasi Manajemen (SIM) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- d. Layanan *Maintenance*, Penyediaan Jaringan komputer dan Internet. Komputer dan jaringan internet adalah produk teknologi yang rentan gangguan serta kerusakan. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pemeliharaan komputer dan pengecekan jaringan secara berkala.
- e. Fasilitasi akses koneksi internet dan intranet bagi seluruh institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai ke tingkat Desa dan Kelurahan agar dapat meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- f. *Collecting data* dan *security data* agar seluruh informasi yang dibutuhkan baik untuk institusi pemerintah maupun masyarakat dapat terkendali dalam satu sistem data center serta menghasilkan data dan informasi yang *uptodate/terkini* dan *real time*. Dinas Komunikasi dan Informatika meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat dan mempersiapkan media layanan Media Center.
- g. Kemudian dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat guna terbentuknya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyajikan informasi tersebut dalam bentuk website atau portal. Dinas Komunikasi dan Informatika

menyediakan perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas agar mekanisme komunikasi antar SKPD berjalan efektif dan efisien.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Hambatan/permasalahan dapat diidentifikasi antara lain :

- Masih belum optimalnya cakupan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi
- Masih banyak sistem informasi dan database perangkat daerah yang belum terintegrasinya
- Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
- Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK
- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur TIK, terutama infrastruktur berbasis FO
- Banyaknya panggilan darurat dari masyarakat yang menyalahgunakan NTPD 112
- Gresik belum memiliki *Complaint Handling System* desa yang berbasis Teknologi Informasi
- Akses internet dan telekomunikasi masyarakat belum merata di beberapa ruang publik dan terdapat area yang masih *blankspot*
- Masih belum maksimalnya layanan publik berbasis elektronik
- Kurang tersedianya Pedoman Tata Kelola dan Manajemen SPBE
- Proses Penganggaran SPBE Belum Terkoordinasi

- Dalam bidang SPBE masih terdapat beberapa hal yang masih minim dan belum maksimal dalam penerapannya misalkan : 1. manajemen SPBE, 2. Audit SPBE, 3. SDM Pengelola SPBE
- Teknologi yang sangat cepat berkembang : Industri 4.0 ->Artificial Intelligence, Big Data, Internet Of Thing
- Kurangnya Peran Perangkat Daerah dalam Penerapan SPBE
- Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi
- Kurangnya kesadaran perangkat daerah terhadap data yang dapat dipublikasikan
- Masih rendahnya tingkat keamanan pengelolaan informasi dan data
- Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilandaskan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
- Sulitnya mendapatkan data dengan jenis dan kedalaman tertentu, karena keterbatasan kewenangan serta belum tersedianya Regulasi tentang Satu Data
- Kegiatan Rakor rencana perubahan perda telekomunikasi bersama pada kegiatan fasilitasi sarana komunikasi daerah tidak tercapai dikarenakan adanya pandemi covid-19
- Masih adanya kesenjangan pemanfaatan Teknologi Informasi (*Digital Divide*) antara Desa dan Kota menyebabkan belum optimalnya penyebar luasan informasi kepada masyarakat

2.3.2. Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026, Tugas dan Fungsi Diskominfo termasuk dalam **Misi ke-1** yaitu *Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel serta mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif*. Dalam rangka pencapaian misi

pertama di atas maka ditetapkan **Tujuan ke-1** yaitu “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas berdasarkan Good and Clean Governance”, tujuan ke-1 tersebut dijabarkan dalam sasaran pembangunan **Sasaran ke-1** sebagai berikut : “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi” dengan indikator kinerja yang diampuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah *Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik*. Penyelarasan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan serta penetapan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dijabarkan ke dalam rumusan sebagaimana berikut :

Pemetaan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan <i>Good and Clean Governance</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indeks Inovasi Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Tujuan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Menciptakan Tata Kelola	Menghadirkan Tata Kelola	S.1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan	2,55	3,01	3,19	3,65	3,86	4,03	4,13	4,13
	Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif	Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan <i>Good and Clean Governance</i>		yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Berbasis Elektronik								

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Terdapat 3 Domain, 7 Aspek dan 35 Indikator dalam penilaian SPBE sesuai dengan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Target Capaian Indeks SPBE Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah 3,86 dan terealisasi sebesar 4,32. Dengan demikian capaian Indeks SPBE Kabupaten Gresik adalah 111,92%. Capaian Indeks SPBE ini mengalami peningkatan dari tahun 2024.

2.3.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Adapun tantangan dalam pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik antara lain :

- a. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik, baik dampak positif maupun dampak negatif sehingga perlu dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut.
- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi yang masih sangat terbatas dan kurang merata di wilayah pemerintahan Kabupaten Gresik.
- c. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap teknologi, informasi dan komunikasi, sehingga masih terjadi kesenjangan pemahaman informasi di masyarakat.
- d. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur Pemerintah Daerah.
- e. Belum optimalnya keamanan pengelolaan data informasi.

- f. Terbatasnya kecepatan koneksi internet di wilayah pemerintahan kabupaten Gresik.
- g. Kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari pengetahuan IT.

Sedangkan peluang yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam pengembangan pelayanan antara lain :

- a. Komitmen kepala daerah untuk mendukung program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
- b. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c. Tersedianya media teknologi informasi dan komunikasi untuk didayagunakan.
- d. Kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Meningkatnya sistem keamanan informasi bersifat rahasia yang memanfaatkan teknologi informasi.
- f. Pesatnya perkembangan teknologi memungkinkan segera terciptanya Program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2.3.4. Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Beberapa rekomendasi yang dilakukan dalam perumusan program kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

- Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia pengelola IT sampai tingkat operator di lingkungan pemerintahan dengan cara Fasilitasi dan Pendampingan.
- efisiensi dan efektifitas dalam kinerja dan pelayanan publik dalam bidang IT antara lain mencakup Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan Berbasis Elektronik, infrastruktur, aplikasi dan kelembagaan pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Gresik

- Fasilitasi dan koordinasi terkait pengaduan yang masuk kepada OPD penyelenggara pelayanan publik yang mengampuh/berwenang.
- monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan kepada seluruh Unit Kerja penyelenggara pelayan publik dengan melibatkan APIP sebagai pengawas internal
- Menyusun regulasi tentang keamanan informasi berdasarkan peraturan perundangan dan perkembangan teknolog
- Melaksanakan pembangunan teknologi informasi yang terintegrasi antar satu perangkat daerah dengan yang lainnya.
- Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
- Mengembangkan inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Mengoptimalisasi pembangun sistem komunikasi di area *blankspot*.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Meningkatkan Aksesibilitas telekomunikasi dan internet dengan menggunakan CSR atau bekerja sama *tower provider* dan *telco operator*.

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diiringi dengan derasnya arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan keamanan sistem. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang. Beberapa **isu-isu strategis** dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

- a. Belum Terangrangkan Lisensi, Sewa Cloud dan Pengembangan IOP khususnya Pemetaan dan Penggunaan Google Gemini AI untuk pemangku kepentingan
- b. Guna meningkatkan indeks SPBE sesuai dengan Target RPJMD maka diperlukan fasilitasi dari Program Kerja Tim Koordinasi SPBE Kab Gresik;
- c. Pengembangan Aplikasi GRESIKPEDIA diperlukan untuk mengakomodasi dari keberlanjutan Nawakarsa dan upaya peningkatan pengguna dengan sosialisasi dan merchandise;
- d. Untuk meningkatkan capaian Domain Layanan pada Indikator 32 – 47 pada Indeks SPBE diperlukan Fasilitasi Monev terhadap seluruh layanan serta meindaklanjuti dari Rekomendasi saat disampaikan hasil Monev oleh Asesor Eksternal KemenpanRB pada saat Wawancara penilaian Indeks SPBE bulan Oktober dipimpin Sekda
- e. Adanya kebutuhan untuk penarikan Jaringan Intra Pemerintah ke MPP baru di Bunder
- f. Penambahan beberapa CCTV untuk menambah pengawasan di wilayah Pemkab Gresik (4 Titik) yang terintegrasi dengan Command Center
- g. Peningkatan Kapasitas Server di Ruang Server Pemkab Gresik di Kantor Bupati sebagai Langkah antisipasi jika terjadi masalah di PDN serta untuk Back Up data dari PDN, mengingat pernah terjadi masalah di PDN sehingga mengganggu layanan aplikasi di Pemkab Gresik (Juni 2024);
- h. Dalam rangka tindak lanjut ISO 27001 diperlukan adanya penguatan Pengamanan Sistem dengan mengadakan Firewall yang sesuai dengan kapasitas bandwidth serta menjaga Jaringan Intra Pemerintah serta webserver lebih aman dari serangan malware/ransomware dan untuk dapat mengatasi penggunaan Judi Online di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Serta untuk dapat membantu CSIRT untuk patrol cyber di website dan aplikasi dengan subdomain gresikkab.go.id
- i. Banyaknya berita negatif yang menyerang Pemerintah

- j. Berkembangnya berita/info hoax di media sosial, Misalkan tentang Isu social berita hoaks
- k. Inkonsistensi data statistik yang dihasilkan oleh Produsen Data
- l. Data statistik yang disajikan belum memenuhi prinsip Satu Data Indonesia

Ke depannya, pengembangan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Gresik tidak hanya terbatas pada lingkup internal Pemerintahan saja, namun akan diterapkan lebih luas sesuai dengan konsep GRESIK SMART CITY. Konsep ini akan menempatkan Kabupaten Gresik sebagai kota cerdas sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan pengembangan ekonomi daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa terkait dengan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, maka Pemerintah perlu menaruh perhatian khususnya mengenai informasi yang wajib dibuka untuk publik, informasi yang dikecualikan, dan juga mekanisme penanganan sengketa informasi. Pemerintah Kabupaten Gresik juga harus memperhatikan penyelenggaraan *website*, konten, Sumber Daya Manusia serta infrastrukturnya.

Selain itu juga berpedoman pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpres No. 95/2018 tentang SPBE. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa terdapat beberapa urusan, salah satunya adalah urusan komunikasi dan informatika yang menangani masalah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain serta Pengelolaan *e-Government*.

Pemerintah dapat menggunakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada publik serta diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya bagi publik yang kini menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap Pemerintah.

Penjabaran Program Nasional, Pembangunan yang berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan (UU No. 32/2009).

Dalam capaian Program Nasional, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik memiliki kontribusi mengampuh indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai berikut :

- a. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (1 indikator);
- b. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (3 indikator);
- c. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (2 indikator);
- d. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (4 indikator).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terkait dengan Pembangunan Ekonomi, melalui publikasi isu strategis pemerintah Kabupaten Gresik dan upaya penanganannya. Mendukung capaian prioritas daerah dalam Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan. Selain itu tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah meningkatkan *awareness* masyarakat, khususnya terkait isu strategis penanggulangan kemiskinan, dimana salah satu indikatornya adalah *stunting*. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain, mengupdate isi website gresikkab.go.id, membuat flyer edukasi, aktif dalam pemberitaan media sosial pemerintahan (youtube, IG, Facebook dan twitter).

3.2. Tujuan Dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, perlu ditetapkan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program secara umum serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan misi ke-1 pembangunan daerah Kabupaten Gresik : *“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel serta Mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif”*, maka ditetapkan pada tujuan ke-1 untuk lima tahun ke depan yaitu *“Menghadirkan Tata kelola Pemerintahan Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas berdasarkan Good and Clean Governance”*. Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran ke-1 : *“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi”*

Berlandaskan terhadap keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Tujuan dan Sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025, maka Tujuan dan Sasaran Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025

Tujuan Renstra dan Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Sasaran Renstra	Target
			2025
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi Indikator : Indeks SPBE	1. Meningkatkan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan	1. Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	92,3%
		2. Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	141
		3. Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	1820
	2. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	85% (7.446 jam dari 8.760 jam)
	3. Meningkatkan Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE	1. Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	100%
		2. Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	75%
	4. Meningkatkan Data Statistik Sektoral yang Disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	4 rekom
	5. Meningkatkan keamanan sistem elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	40

3.3. Program dan Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025 telah mempertimbangkan beberapa faktor antara lain :

1. Mendukung prioritas pembangunan nasional, yaitu :
 - a. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
 - b. Memperkuat infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
2. Mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur, yaitu :
 - a. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur
 - b. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur
3. Mendukung prioritas pembangunan tematik Kabupaten Gresik, yaitu :
 - a. Gresik Akas : Penguatan Reformasi Birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan
 - b. Gresik Mapan : Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan

APBD Tahun 2025 terdapat 5 program 10 kegiatan 33 sub kegiatan dengan total nilai pagu APBD sebesar Rp. 18.023.591.483,50. Terdapat penyesuaian kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Gresik Nomor : 900/329/437.71/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang efisiensi belanja APBD tahun 2025 menindaklanjuti Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 pada beberapa rekening belanja, sehingga dilakukan efisiensi pada beberapa rekening yang dirumuskan dari hasil rapat kerja Dinas Komunikasi dan arahan dari Kepala Dinas dengan nilai Pagu pergeseran/efisiensi sebesar Rp. 17.288.139.718,58. Berikut disajikan Pagu Anggaran APBD tahun 2025 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik sebagai berikut :

Table 3.2 (T-C.33)

Program dan Kegiatan Perangkat daerah APBD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Gresik
Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian 2025	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				18.023.591.484				39.822.625.000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				17.896.632.862				35.374.570.000
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		100%	7.007.017.319			100%	11.410.806.000
2.16.01.2.01	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen/laporan perencanaan dan capaian kinerja SKPD		13 Dokumen/laporan	12.246.048			13 Dokumen/laporan	80.323.600
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat		2 Dokumen	6.903.865	APBD		1 Dokumen	50.323.600

	Daerah	Daerah							
2.16.01.2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	5.342.184	APBD		12 Laporan	30.000.000
2.16.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan		100%	5.919.819.019			100%	5.605.266.856
2.16.01.2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		32 Orang/bulan	5.917.498.979	APBD		34 orang/12 bulan	5.585.180.612
2.16.01.2.02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		13 Laporan	2.320.040	APBD		1 laporan	9.543.122
2.16.01.2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		0	-	APBD		12 laporan	10.543.122
2.16.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah administrasi Kepegawaian perangkat daerah		2 sub kegiatan	-			2 sub kegiatan	462.000.000
2.16.01.2.05.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	-	APBD		1 Paket	95.000.000

2.16.01.2.05.0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 dokumen	-	APBD		1 dokumen	350.000.000
2.16.01.2.05.1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 orang	-	APBD		50 orang	17.000.000
2.16.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	persentase fasilitasi ketersediaan operasional dan administrasi umum perangkat daerah		100%	217.443.052			7 sub kegiatan	1.555.425.131
2.16.01.2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5.717.600	APBD		1 Paket	33.292.900
2.16.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	37.471.800	APBD		6 Paket	720.176.000
2.16.01.2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	4.981.700	APBD		1 Paket	33.000.000
2.16.01.2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	38.423.700	APBD		1 Paket	169.205.000
2.16.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	22.452.232	APBD		2 Paket	177.000.000
2.16.01.2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4 Dokumen	718.200	APBD		4 Dokumen	19.310.000
2.16.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 Laporan	107.677.820	APBD		2 Laporan Dalam Daerah dan Luar Daerah	403.441.231

2.16.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	-			2 sub kegiatan	1.544.890.983
2.16.01.2.07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	-	APBD		2 unit	850.000.000
2.16.01.2.07.0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-	APBD		20 Unit	324.890.983
2.16.01.2.07.1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	-	APBD		1 unit	370.000.000
2.16.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	763.789.200			3 jasa	1.183.404.288
2.16.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	191.301.200	APBD		5 Laporan	384.611.000
2.16.01.2.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		19 Laporan	16.810.000	APBD		3 Laporan	175.993.288
2.16.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		19 Laporan	555.678.000	APBD		19 Laporan	622.800.000
2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah		100%	93.720.000			2 jenis	979.495.142

2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8 Unit (7 unit R-4, 1 unit R-2)	93.720.000	APBD		7 Unit	350.000.000
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	0	APBD		1 Unit	629.495.142
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi		100%	5.033.140.045			100%	4.080.433.000
		2. Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi		100% (3/3)				100% (3/3)	
		3. Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID		100%				100%	
2.16.02.2.01	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Persentase OPD yang menindaklanjuti pengaduan tepat waktu		95,7%	5.033.140.045			95,7%	4.080.433.000
		2. Persentase panggilan kedaruratan yg ditindaklanjuti		100%				100%	
		3. Jumlah OPD yang menyediakan Daftar informasi dan dokumentasi publik		9				9	
		4. Jumlah konten informasi pemerintah yang dipublikasikan		2010				2010	

2.16.02.2.01.0 014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media		1 Laporan	3.532.978.700	APBD		1 dokumen	335.000.000
2.16.02.2.01.0 015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		6 Komunitas	42.740.000	APBD		1 dokumen	355.000.000
2.16.02.2.01.0 017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		1 Permohonan	32.630.400	APBD		1 dokumen	1.050.000.000
2.16.02.2.01.0 019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		3 Rekomendasi	580.072.350	APBD		1 dokumen	315.000.000
2.16.02.2.01.0 021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		2 Media	820.550.995	APBD		1 layanan	750.000.000
2.16.02.2.01.0 023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik		1675 Konten	24.167.600	APBD		1 dokumen	950.433.000
2.16.02.2.01.0 024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan		- Orang	-	APBD		130 orang	325.000.000

2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Bid SPBE : 1. Persentase Dokumen Kebijakan yang dievaluasi		100% (3/3)	5.856.475.498		75%	19.883.331.000
		2. Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi		100% (47/47)			29%	
		3. Persentase aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi		73% (11/15)			75%	
		4. Persentase OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE		100%			100% (3/3)	
		5. Persentase OPD yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE		100%			100% (47/47)	
		Bid. TI : 1. Persentase OPD yang menerapkan manajemen Aset TIK		75% (36/47)			73% (11/15)	
		2. Presentase OPD yang memanfaatkan ruang server		29% (14 OPD / 48 OPD)			100%	
		3. Persentase OPD yang Menggunakan Sistem Penghubung Layanan		75% (36/47)			100%	
2.16.03.2.02	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Bidang SPBE : 1. Jumlah dokumen kebijakan dan tata kelola SPBE yang disusun dan dievaluasi		4 dokumen	5.856.475.498		195 VPS	19.883.331.000
		2. Jumlah Indikator Evaluasi SPBE yang dipenuhi Data Dukung dan Narasinya		47 indikator			22 API	

		3. Jumlah aplikasi yang difasilitasi pengembangannya menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle)		11 aplikasi				2	
		4. Jumlah layanan elektronik yang dikolaborasikan		33 layanan				2	
		5. Jumlah layanan yang dikelola melalui service desk		33 layanan				47	
		Bidang TI : 1. Jumlah PD yang dibina untuk menerapkan manajemen Aset TIK		15 PD				11	
		2. Jumlah VPS yang dikelola		195 VPS				33	
		3. Jumlah API yang dikelola		22 API				33	
2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional		100 Aplikasi	55.300.282			2 dokumen	500.000.000
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		4 Laporan	35.193.450	APBD		2 dokumen	200.000.000
2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan		2 Dokumen	188.410.000	APBD		- 1 Unit	6.869.550.288
2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		3 Dokumen	71.337.950	APBD		15 unit	450.000.000

2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		11 Aplikasi	572.175.900	APBD		- 14 Layanan	353.202.997
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		12 Aplikasi	49.370.300	APBD		6 dokumen	542.301.000
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas		6 unit	58.234.781	APBD		1 dokumen	400.000.000
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		46 Perangkat Daerah	4.826.452.835	APBD		1 Unit	10.568.276.715
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				67.844.272				1.002.890.000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun		33 % (10/30)	67.844.272			33 % (10/30)	1.002.890.000
		2. Persentase PD yang Menerapkan Manajemen Data		75% (36/47)					
2.20.02.2.01	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Jumlah OPD yang menyusun atau mengolah data secara terpilah gender		5 OPD	67.844.272			55 OPD	1.002.890.000
		2. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang memperoleh rekomendasi statistik		15 kali				6 OPD	

2.20.02.2.01.007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		54 Orang	23.700.800	APBD		1 dokumen	440.000.000
2.20.02.2.01.009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu		0 Persentase	-	APBD		37 orang	260000000
2.20.02.2.01.010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		2 Dokumen	44.143.472	APBD		2 unit	302.890.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				59.114.350				3.445.165.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penanganan Serangan Cyber		100%	59.114.350			100%	3.445.165.000
2.21.02.2.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah OPD yang Menerapkan Manajemen Keamanan Informasi		9	59.114.350			12 PD	3.445.165.000
2.21.02.2.01.002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	6.616.400	APBD		-1 Laporan	307.459.535
2.21.02.2.01.003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		1 Laporan	52.497.950	APBD		-1 Laporan	3.137.705.465

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 didasarkan pada Surat Edaran Bupati Gresik Nomor : 050/511/437.71/2025 tanggal 2 Juni 2025 tentang Perubahan Lampiran I Surat Edaran Bupati Gresik Nomor : 050/494/437.71/2025 tanggal 23 mei tentang Perubahan RKPD dan Renja PD Tahun 2025

Tabel 4.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. GRESIK

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATO R PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD	REA LISA SI CAP AIAN REN JA OPD TAH UN 2023	PRA KIRA AN CAP AIAN TAR GET RENJ A OPD TAH UN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SAS ARA N	PRAKIRAA N MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamba h/Berkura ng (10-12)	LOK ASI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TA RG ET	PAG U INDI KAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUB AHAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								16.299.207.495,00	18.023.591.483,50	20.788.139.718,58	4.488.932.223,58						0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							16.299.207.495,00	18.023.591.483,50	20.788.139.718,58	4.488.932.223,58							0,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							16.172.248.873,00	17.896.632.861,50	20.669.861.318,58	4.497.612.445,58							0,00	
1 ,	2.16.01	PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPA TEN/KOT A	Persentas e ketercapa ian sasaran program OPD				100 %	100 %	5.730.633.330,00	7.007.017.318,50	6.923.514.478,58	- 5.730.633.330,00							0,00	

2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen/aporan perencanaan dan capaian kinerja SKPD</i>				100 %	100 %	12.246.049,00	12.246.047,92	10.180.000,00	- 2.066.049,00		Mempertuak reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pemanfaatan Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
--------------	--	--	--	--	--	-------	-------	---------------	---------------	---------------	----------------	--	--	--	---	------	----------------------------------

																Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n					
2.16.01. 2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Lapo ran	12 Lapo ran	5.342.1 84,00	5.342.1 84,00	4.200.0 00,00	- 1.142.184, 00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi,	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A		

[illegible]

2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan gaji dan fasilitas penyusunan laporan keuangan SKPD				100 %	100 %	4.643.435.029,00	5.919.819.018,58	5.919.334.878,58	1.275.899.849,58		Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pemanfaatan Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
--------------	--	---	--	--	--	-------	-------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	---	------	----------------------------------

																data pemba nguna n				
	2.16.01. 2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Oran g/b ulan	32 Oran g/b ulan	0,00	5.917.4 98.978, 58	5.917.4 98.978, 58	5.917.498. 978,58	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A

																Pengu atan Refor masi biokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pempa nguna n				
	2	ON URUSAN							16.299. 207.495 ,00	18.023. 591.483 ,50	20.788. 139.718 ,58	4.488.932. 223,58							0,00	
	2.16	URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG XX							16.172. 248.873 ,00	17.896. 632.861 ,50	20.669. 861.318 ,58	4.497.612. 445,58							0,00	
	2.16.01. 2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAIT AN DENGAN PELAYAN AN DASAR							16.299. 207.495 ,00	18.023. 591.483 ,50	20.788. 139.718 ,58	4.488.932. 223,58							0,00	

	2.16	URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA							16.172. 248.873 ,00	17.896. 632.861 ,50	20.669. 861.318 ,58	4.497.612. 445,58							0,00	
	2.16.01. 2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
O N	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATO R PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD	REA LISA SI CAP AIAN REN JA OPD TAH UN 2023	PRA KIRA AN CAP AIAN TAR GET RENJ A OPD TAH UN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										K ELO MPO K SAS ARAN	PRAKI RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B
							TARG ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertam bah/Berk urang (10- 12)	L OKASI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			T AR GE T	P AGU INDI KAT IF (Rp)	
							SEB ELUM	SES UDAH	KPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				13 Lapo ran	1 Lapo ran	2.320.0 40,00	2.320.0 40,00	1.835.9 00,00	- 484.140,0 0	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMUM (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyel udupa n.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mban g an Smart Gover nance bebas is satu data pemba			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A

[illegible]

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/T riwulana n/Semeste ran SKPD				12 Lapo ran	12 Lapo ran	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A
--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------	------	------	------	---	--	--	---	--	--	------	---

																data pemb guna n				
	2.16.01. 2.06	Administra si Umum Perangkat Daerah	<i>persentas e fasilitasi ketersedia an operasion al dan administra si umum perangkat daerah</i>				100 %	100 %	216.444 .052,00	217.443 .052,00	134.490 .400,00	- 81.953.65 2,00			Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemb guna n Pengu atan Refor	-		0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

															penyeludupan.	berbasis satu data pemanfaatan Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pembangunan Smart Governance berbasis satu data pemanfaatan					
	2.16.01. 2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n				1 Pake t	1 Pake t	37.485. 760,00	37.471. 800,00	40.782. 600,00	3.296.840, 00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A
--	--	--	---	--	--	--	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	---	--	--	---	--	--	------	---

																data pemba nguna n				
	2.16.01. 2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n				1 Pake t	1 Pake t	4.997.3 73,00	4.981.7 00,00	4.981.7 00,00	-15.673,00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A

																Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n					
	2.16.01. 2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATO R PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD	REA LISA SI CAP AIAN REN JA OPD TAH UN 2023	PRA KIRA AN CAP AIAN TAR GET RENJ A OPD TAH UN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SAS ARA N	PRAKIRAA N MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertam bah/Berk urang (10- 12)	LOK ASI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TA RG ET	PAG U INDI KAT IF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUB AHAN 2025				NASIO NAL	DAER AH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n				1 Pake t	1 Pake t	43.232. 276,00	38.423. 700,00	30.792. 700,00	- 12.439.57 6,00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A
--	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------------	---	--	--	---	--	--	------	---

																data pemba nguna n				
	2.16.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n				2 Pake t	2 Pake t	22.633. 802,00	22.452. 232,00	11.111. 400,00	- 11.522.40 2,00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A

																Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n					
2.16.01. 2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- Undangan yang Disediaka n				1 Doku men	4 Doku men	718.200 ,00	718.200 ,00	715.400 ,00	-2.800,00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A		

															dan penyeludupan.	nance berbasis satu data pemanfaatan Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pemanfaatan				
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	101.884.500,00	107.677.820,00	40.389.000,00	- 61.495.500,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Mempertuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>persentase ketersediaan pengadaaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Mempertuakan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pembangunan Smart Governance berbasis data penggunaan Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pembangunan Smart Governance berbasis data	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
--------------	--	--	--	--	--	-------	-------	------	------	------	------	--	--	---	--	---	--	------	----------------------------------

																data pemb nguna n				
	2.16.01. 2.07.00 05	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediaka n				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemb nguna n			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A

																Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n				
	2.16.01. 2.08	Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	<i>persentas e fasilitasi ketersedia an jasa penunjang urusan pemerinta h daerah</i>				100 %	100 %	734.038 .000,00	763.789 .200,00	763.789 .200,00	29.751.20 0,00			Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu	-		0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A

															n.	data pemba nguna n Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n				
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATO R PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD	REA LISA SI CAP AIAN REN JA OPD TAH UN 2023	PRA KIRA AN CAP AIAN TAR GET RENJ A OPD TAH UN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SAS ARA N	PRAKIRAA N MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamba h/Berkura ng (10-12)	LOK ASI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TA RG ET	PAG U INDI KAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	KPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUB AHAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01. 2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	172.400 .000,00	191.301 .200,00	191.301 .200,00	18.901.20 0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuakan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mempertuakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
--	--	--	---	--	--	--	--------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---	---------------------------------	---	---	--	------	---

																data pemba nguna n				
	2.16.01. 2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n				3 Lapo ran	3 Lapo ran	10.760. 000,00	16.810. 000,00	16.810. 000,00	6.050.000, 00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A

																Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n				
	2.16.01. 2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n				19 Lapo ran	19 Lapo ran	550.878 .000,00	555.678 .000,00	555.678 .000,00	4.800.000, 00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A

2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>persentase fasilitas ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>				100 %	100 %	124.470.200,00	93.720.000,00	95.720.000,00	- 28.750.200,00		Mempertuakan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis data penggunaan Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis data	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
--------------	---	--	--	--	--	-------	-------	----------------	---------------	---------------	-----------------	--	--	--	---	------	----------------------------------

																Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n				
	2.16.01. 2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi				1 Unit	1 Unit	36.150. 200,00	0,00	0,00	- 36.150.20 0,00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A

															dan penyeludupan.	nance berbasis satu data pemanfaatan Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pemanfaatan				
1	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID				100 %	100 %	4.955.140.045,00	5.033.140.045,00	8.158.377.300,00	- 4.955.140.045,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD ESTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARAN	PRAKIRAA N MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamba h/Berkura ng (10-12)	LOK ASI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TA RG ET	PAG U INDI KAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUB AHAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah konten informasi pemerintah yang dipublikasikan Jumlah PD yang menyediakan Daftar informasi dan dokumentasi publik Persentase panggilan kedaruratan yg ditindaklanjuti Persentase PD yang menindaklanjuti pengaduan tepat waktu				2010 Konten 95,7 % 9 OPD	100 % 2800 Konten 95,7 % 9 OPD	4.955.140.045,00	5.033.140.045,00	8.158.377.300,00	3.203.237.255,00			Mempertuakan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pembangunan Smart Governance berbasis satu data pemanfaatan Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

																publik inklusif dan respon sif gender serta penge mban g an Smart Gover nance bebas is satu data pemba nguna n				
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikas i dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				1 Lapo ran	1 Lapo ran	3.532.978.700,00	3.532.978.700,00	6.681.780.500,00	3.148.801.800,00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korupsi, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mban g an Smart Gover nance bebas is satu data pemba nguna n			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A

																Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n					
2.16.02. 2.01.00 15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																				
		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendisemi nasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo					1 Kom unita s	2 Kom unita s	42.740. 000,00	42.740. 000,00	34.367. 500,00	- 8.372.500, 00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A	

[illegible]

			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang an				1 Per mohon an	1 Per mohon an	32.630. 400,00	32.630. 400,00	25.965. 500,00	- 6.664.900, 00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A
--	--	--	---	--	--	--	-------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	---	--	--	---	--	--	------	---

[illegible]

Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

1
Reko
men
dasi24
Reko
me
ndas
i

580.072
350.00

580.072
350.00

574.040
000.00

6.032.350,
00

Kab.
Gresi
k,

DAN
A
ALO
KASI
UMU
M
(DAU
)

Memp
erkuat
reform
asi
politik
hukum
dan
birokr

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data

100

0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A
------	---

																Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n				
	2.16.02. 2.01.00 21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikas i publik milik pemerinta h daerah yang dikelola maupun pemanfaat an media berbayar sesuai kriteria/juk nis				1 Medi a	16 Medi a	742.550 .995,00	820.550 .995,00	820.528 .300,00	77.977.30 5,00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU) DBH CUK AI HASI L TEM BAK AU (CHT)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A

															dan penyeludupan.	nance berbasis satu data pembangunan Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan					
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																			
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODERE STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELompok Sasaran	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBERDANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

			Jumlah Konten Informasi Publik				1 Kont en	562 Kont en	24.167. 600,00	24.167. 600,00	21.695. 500,00	- 2.472.100, 00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A
--	--	--	---	--	--	--	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	---	--	--	---	--	--	------	---

																data pemb nguna n				
	2.16.02. 2.01.00 24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
			Jumlah ASN bidang komunikas i publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pel atihan				130 Oran g	130 Oran g	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemb nguna n			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A

																Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pempa nguna n				
2	2.16.03	PROGRA M PENGEL OLAAN APLIKASI INFORMA TIKA	Persentas e OPD yang Menggun akan Sistem Penghub ung Layanan Prosentas e Dokumen Kebijakan yang dievaluasi				75 %	75 100 % %	5.486.4 75.498, 00	5.856.4 75.498, 00	5.587.9 69.540, 00	- 5.486.475. 498,00							0,00	

2.16.03.2.02	Pengelolaan E-governmen di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah API yang dikelola Jumlah aplikasi yang difasilitasi pengembangannya menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle) Jumlah Dokumen Perencanaan SPBE yang dievaluasi Jumlah Indikator Evaluasi SPBE yang dipenuhi Data Dukung dan Narasinya Jumlah layanan yang dikelola melalui service desk Jumlah PD yang dibangun untuk menerapkan manajemen Aset TIK Jumlah pedoman pelaksanaan SPBE yang disusun dan dievaluasi				11 Aplikasi 15 OPD 195 VPS 22 API 33 Layanan 47 Indikator 4 Dokumen	11 Aplikasi 15 OPD 212 VPS 2 Dokumen 33 Layanan 36 API 47 Indikator 4 Pedoman	5.486.475.498,00	5.856.475.498,00	5.587.969.540,00	101.494.042,00		Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis data pemanfaatan Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis data	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
--------------	---	---	--	--	--	---	--	------------------	------------------	------------------	----------------	--	--	---	---	------	----------------------------------

			Jumlah VPS yang dikelola													data pembana nguna n				
	2.16.03. 2.02.00 13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional																		
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				100 Aplikasi	100 Aplikasi	55.300. 282,00	55.300. 282,00	36.966. 700,00	- 18.333.58 2,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuakan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyel	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pembangunan Smart Governance berbasis			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

																udupa n.	is satu data pemba nguna n Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n				
	2.16.03. 2.02.00 15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																			

			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyeleng garaan SPBE di lingkungan Pemda				4 Lapo ran	4 Lapo ran	35.193. 450,00	35.193. 450,00	21.750. 450,00	- 13.443.00 0,00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A
--	--	--	---	--	--	--	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------------	---	--	--	---	--	--	------	---

[illegible]

Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah

1
Doku
men

1
Doku
men

188.4
.000188.
.000110.
.000

77.76

Kab	
Gre	

	DAM
	A

Mer	erke
-----	------

	Pr at
--	----------

gu	
----	--

--	--

--	--

00	D K
----	--------

AS
MU

																Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n					
	2.16.03. 2.02.00 19	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																			
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATO R PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD	REA LISA SI CAP AIAN REN JA OPD TAH UN 2023	PRA KIRA AN CAP AIAN TAR GET RENJ A OPD TAH UN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SAS ARA N	PRAKIRAA N MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamba h/Berkura ng (10-12)	LOK ASI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TA RG ET	PAG U INDI KAT IF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUB AHAN 2025				NASIO NAL	DAER AH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksana an Manajeme n SPBE				3 Doku men	3 Doku men	71.337. 950,00	71.337. 950,00	54.122. 950,00	- 17.215.00 0,00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A
--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------------	---	--	--	---	--	--	------	---

																Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n					
2.16.03. 2.02.00 21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																				
		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubu ng Layanan Pemerinta h Daerah				12 Aplik asi	30 Aplik asi	49.370. 300,00	49.370. 300,00	20.529. 000,00	- 28.841.30 0,00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A		

																dan penyeludupan.	nance berbasis satu data pemanfaatan Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pemanfaatan				
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																			

			Jumlah perangkat daerah yang mendapat kan sosialisasi program Kabupaten /Kota Cerdas				6 unit	28 unit	58.234. 781,00	58.234. 781,00	46.196. 800,00	- 12.037.98 1,00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------------	---	--	--	---	--	--	------	---

[illegible]

																Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n				
	2.20	URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG STATISTI K							67.844. 272,00	67.844. 272,00	62.940. 400,00	- 4.903.872, 00							0,00	
1 ,	2.20.02	PROGRA M PENYELE NGGARA AN STATISTI K SEKTOR AL	Persentas e PD yang Menerapk an Manajeme n Data Persentas e Analisa Data Sektoral yang disusun				75 33 % %	75 33 % %	67.844. 272,00	67.844. 272,00	62.940. 400,00	- 67.844.27 2,00							0,00	

2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Data Induk yang dikelola Jumlah OPD yang mengumpulkan data statistik sektoral Jumlah PD yang menyusun atau mengolah data secara terpisah gender				15 Kali 5 OPD	45 OPD 4 Data 5 OPD	67.844.272,00	67.844.272,00	62.940.400,00	- 4.903.872,00		Mempertuakan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pembangunan Smart Governance berbasis satu data penggunaan Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pembangunan Smart Governance berbasis satu	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
--------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--	---	---	---	------	----------------------------------

																data pempa nguna n				
	2.20.02. 2.01.00 07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATO R PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD	REA LISA SI CAP AIAN REN JA OPD TAH UN 2023	PRA KIRA AN CAP AIAN TAR GET RENJ A OPD TAH UN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMP OK SAS ARA N	PRAKIRAA N MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamba h/Berkura ng (10-12)	LOK ASI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TA RG ET	PAG U INDI KAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUB AHAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

			Jumlah pegawai yang mendapat kan pelatihan di bidang statistik				37 Oran g	45 Oran g	23.700. 800,00	23.700. 800,00	19.585. 000,00	- 4.115.800, 00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A
--	--	--	---	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	---	--	--	---	--	--	------	---

																data pemb nguna n				
	2.20.02. 2.01.00 09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			<i>Persentas e kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu</i>				0 Pers enta se	0 Pers enta se	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemb nguna n			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A

																Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n					
	2.20.02. 2.01.00 10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																			
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Doku men	1 Doku men	44.143. 472,00	44.143. 472,00	43.355. 400,00	788.072,0 0	- 0	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi.	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A

															dan penyeludupan.	nance berbasis satu data pembangunan Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan				
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSONALIA						59.114.350,00	59.114.350,00	55.338.000,00	- 3.776.350,00								0,00	
1	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSONALIA UNTUK PENGAMATAN INFORMASI	Prosentase Penanganan Serangan Cyber				100 %	100 %	59.114.350,00	59.114.350,00	55.338.000,00	- 59.114.350,00							0,00	

2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menerapkan manajemen keamanan informasi					9 OPD	9 OPD	59.114.350,00	59.114.350,00	55.338.000,00	- 3.776.350,00		Mempertuakan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis data penggunaan Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis data	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
--------------	--	---	--	--	--	--	-------	-------	---------------	---------------	---------------	----------------	--	---	--	---	--	------	----------------------------------

																Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover nance berbas is satu data pemba nguna n					
2.21.02. 2.01.00 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																				
		Jumlah Laporan Pelaksana an Keamanan Informasi Pemerinta han Daerah Kabupaten /Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Lapo ran	1 Lapo ran	52.497. 950,00	52.497. 950,00	51.483. 000,00	- 1.014.950, 00	Kab. Gresi k, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi,	Pengu atan Refor masi birokra si diduku ng pelaya nan publik inklusif dan respon sif gender serta penge mbang an Smart Gover			0,00	DINAS KOMU NIKASI DAN INFOR MATIK A		

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik untuk tahun anggaran PAPBD 2025, mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih, sehingga diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik pada Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras serta dengan dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang-bidang agar konsisten dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kebijakan yang dilakukan :

- peningkatan kualitas informasi melalui media elektronik pada konten Situs Web Pemerintah Kabupaten Gresik dengan mengutamakan Keterbukaan informasi secara aktual dan faktual dalam koridor *e-Government* guna menggugah partisipasi publik secara konstruktif untuk mendukung pembangunan daerah.
- optimalisasi sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

- optimalisasi penggunaan perangkat lunak sistem operasional dan program *open source* untuk menekan belanja pembelian perangkat lunak berbayar.
- peningkatan profesionalitas, kreativitas, dan kompetensi aparatur.
- Melakukan Monitoring Basis data di tiap OPD,
- Melakukan Pengembangan data warehouse dengan pengaplikasian SiMantra Builder
- Kebijakan optimalisasi sistem informasi dan sistem aplikasi bagi peningkatan kinerja aparatur dan efektivitas fungsi organisasi perangkat daerah.
- Menyusun dan menerapkan standart data dalam pengelolaan data yang meliputi definisi operasional, metode perhitungan, satuan dan kedalaman data.
- Menetapkan Regulasi tentang Satu Data Dan Data Geospasial.
- penerapan manajemen keamanan informasi secara optimal melalui penyusunan tata kelola keamanan informasi untuk meningkatkan nilai Indeks Keamanan Informasi

Gresik, 25 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gresik,



JOHAR GUNAWAN, S.Pd., S.E, M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19750319 200604 1009